



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

UPT. BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA

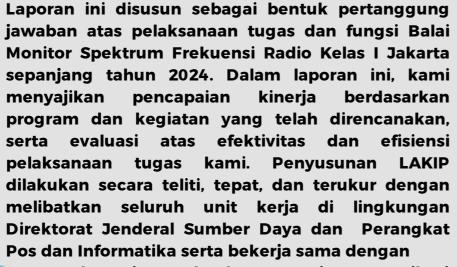


Renny Kusumaningtyas

Plt. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun Anggaran 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dapat diselesaikan dengan baik.



Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebagai bagian dari instansi pemerintahan yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai landasan, Kami menyadari akan pentingnya pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari negara yang bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Plt. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta

Renny Kusumaningtyas

DAFTAR ISI

- 2 KATA PENGANTAR
- 3 DAFTAR ISI
- 4 RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 8 LATAR BELAKANG
- 10 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- 11 POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS
- 12 SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB 2 PERJANJIAN KINERJA

- 14 SASARAN PROGRAM
- **15** PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- 20 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 21 Sasaran Kinerja 1
- 117 Sasaran Kinerja 2

BAB 4 PENUTUP

140 PENUTUP

Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Balai Monitor memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang telekomunikasi, khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan frekuensi radio di Indonesia.



Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital bertanggung jawab dalam mengelola spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta mengatur sertifikasi perangkat informatika. Hal ini bertujuan untuk memastikan tersedianya layanan telekomunikasi yang berkualitas bagi masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memiliki tugas utama dalam melakukan pemantauan, pengukuran parameter teknis, deteksi sumber pancaran frekuensi, serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Langkah-langkah ini dilakukan guna memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio berjalan dengan tertib, efisien, sesuai dengan peruntukannya, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat komunikasi.

Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama tahun 2024 dievaluasi berdasarkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan di awal tahun.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor, serta sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio di Indonesia, yang dijelaskan pada tabel berikut:

Sasaran Kinerja	Kinerja	Indikator Kinerja		Target 2024	Capaian 2024						
		1	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%						
									2	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum	3	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%						
	4	Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%							
		5	5	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100%					

Sasaran Kinerja	Kinerja	Indikator Kinerja		Target 2024	Capaian 2024
		6	Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	100%
	(lanjutan) Meningkatnya	7	Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%
(lanjutan) 1	Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	8	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%
		9	Persentase (%) Sosialisasi/Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%	100%
		10	Persentase (%)ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100%	100%
		11	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100%	100%
	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT Jakarta Tahun 2024	89	90.97
2		2	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100	100

Pada Sasaran Kinerja 1 :

"Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi" terdapat 11 indikator kinerja.

Pada Sasaran Kinerja 2 :

"Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien" terdapat 2 indikator kinerja.



A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Direktorat Jenderal Infastruktur Digital (DJID) merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Direktorat jenderal Infrastruktur dan Digital dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip good governance.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital bertanggung jawab dalam mengelola spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta mengatur sertifikasi perangkat informatika. Hal ini bertujuan untuk memastikan tersedianya layanan telekomunikasi yang berkualitas bagi masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta, Balai Monitor memiliki tugas utama dalam melakukan pemantauan, pengukuran parameter teknis, deteksi sumber pancaran frekuensi, serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Langkah-langkah ini dilakukan guna memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio berjalan dengan tertib, efisien, sesuai dengan peruntukannya, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat komunikasi.

Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama tahun 2024 dievaluasi berdasarkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan di awal tahun.

Penggunaan spektrum frekuensi radio perlu mendapat ijin baik data untuk lokal maupun ineternasional radio siaran, komunikasi radio, seluler, dan keselamatan jiwa manusia karena merupakan sumber daya milik Negara yang merambat tanpa mengenal batas.

Penggunaan spektrum frekuensi radio perlu mendapat ijin baik data untuk lokal maupun ineternasional radio siaran, komunikasi radio, seluler, dan keselamatan jiwa manusia karena merupakan sumber daya milik Negara yang merambat tanpa mengenal batas.

Pengaturan frekuensi diperlukan untuk mencegah terjadinya penggunaan spektrum frekuensi radio yang illegal dan saling mengganggu antar spektrum frekuensi radio. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital selaku penanggung jawab untuk menangani masalah-masalah pokok yang diperlukan dalam menjamin pengalokasian dan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk jasa telekomunikasi di Indonesia. Tugas administrasi dilakukan bersama-sama oleh Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Operasi Sumber Daya dan Direktorat Pengendalian Ditjen Infrastruktur dan Digital. Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Digital didukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya oleh sejumlah Balai dan/atau Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya

Dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil. Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio. **Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:**

- 1. Penyusunan rencana dan program;
- 2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- 3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika;
- 4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- 5. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;
- 6. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- 7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- 8. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- 9.Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta terdiri dari :

1. Kepala Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur Organisasi:

Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta



Pada tanggal 5 November 2024, telah ditetapkan Peraturan Presiden Perubahan tentana Nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meniadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi) tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 174 Tahun 2024. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan perkembangan pesat di sektor digital.

Transformasi ini tidak hanya mencerminkan perubahan nama, tetapi juga penyesuaian dalam ruang lingkup dan tugas serta fungsi kementerian yang lebih mengarah pada kebutuhan dan tantangan era digital.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Dalam upaya mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan bebas dari interferensi yang merugikan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta perlu mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengendalian yang profesional serta adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi telekomunikasi. Namun demikian, pengelolaan spektrum frekuensi radio saat ini masih menghadapi sejumlah permasalahan strategis, hal ini berdasarkan dari hasil monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio, antara lain:

- 1. Masih tingginya penggunaan frekuensi secara ilegal yang berpotensi mengganggu keselamatan maritim dan penerbangan;
- 2. Maraknya pemanfaatan spektrum frekuensi tanpa Izin Stasiun Radio (ISR) atau tidak sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
- 3. Munculnya gangguan pada layanan operator seluler akibat penggunaan repeater ilegal dan jammer yang tidak sah;
- 4.Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban kepemilikan ISR dalam setiap penggunaan spektrum frekuensi radio.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pentunjuk Teknis Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderall Infrastruktur dan Digital meliputi:

- 1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- 2. Perencanaan Kinerja yang berisi penjelasan ringkas mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2024.
- 3.Akuntabilitas Kinerja yang berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan indikator kinerja dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- 4.Penutup yang berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan ditempuh oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.



A. Sasaran Program

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya Program, Sasaran Kinerja, dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Infrastruktur Digital (Infradigi). sebagai berikut:

1. Program Utama Ditjen Infrastruktur Digital

Ditjen Infrastruktur Digital (Infradigi) Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki fokus program pada pembangunan, pemerataan, serta optimalisasi infrastruktur digital di Indonesia, khususnya dalam hal:

- Pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi: Termasuk backbone kabel, radio, frekuensi, dan satelit untuk memperluas konektivitas digital hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
- Peningkatan kualitas layanan telekomunikasi: Melalui penetapan standar kualitas (Quality of Service/QoS) serta pengawasan implementasinya.
- Pemanfaatan infrastruktur digital untuk akselerasi transformasi ekonomi: Menyediakan akses internet cepat, pendukung layanan digital publik, dan transformasi digital di berbagai sektor industri, pemerintahan, serta masyarakat.

2. Sasaran Kinerja Ditjen Infrastruktur Digital

Beberapa sasaran kinerja utama yang diusung dalam rencana strategis Ditjen Infradigi adalah:

- Peningkatan cakupan infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar (broadband) di seluruh Indonesia.
- Peningkatan kualitas layanan telekomunikasi dan internet dengan memastikan pemenuhan standar nasional.
- Pemerataan siaran digital agar 80% populasi dapat menikmati siaran digital pada 2024.
- Ketersediaan sistem teknologi informasi yang andal untuk layanan publik dan pemerintahan berbasis digital.
- Pengelolaan spektrum frekuensi secara efisien dan transparan

3. Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Infradigi

IKP merupakan parameter terukur dalam mengawasi keberhasilan sasaran kinerja program, di antaranya:

Program	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Program
Pembangunan Infrastruktur	95% desa terjangkau jaringan	Persentase desa yang memiliki
Broadband	bergerak pita lebar	akses broadband
Penyebaran Jaringan Tetap	60% kecamatan tercakup	Persentase kecamatan dengan
Pita Lebar	jaringan tetap	akses jaringan tetap
Digitalisasi Siaran	80% populasi akses siaran digital	Cakupan jumlah penduduk yang terjangkau siaran digital
Optimalisasi Spektrum Frekuensi dan Satelit	Penataan spektrum sesuai standar internasional	Jumlah lelang/pemanfaatan spektrum yang dilakukan secara efisien dan transparan
Peningkatan Kualitas Layanan	Standar QoS terpenuhi di level	Persentase pemenuhan standar
Telekomunikasi	nasional	kualitas layanan (QoS)
Transformasi Layanan Publik	Akses publik ke layanan digital	Persentase layanan publik yang
Digital	meningkat	sudah terdigitalisasi
Pengembangan Ekosistem Digital Nasiona	Tercapainya target startup digita	Jumlah startup digital baru yang tercipta

Indikator di atas mengacu pada target strategis hingga 2024 dan sesuai dengan Rencana Strategis Kementrian Kominfo untuk mendukung transformasi digital nasional. Evaluasi dan detail pemenuhan indikator dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai perkembangan capaian serta kebutuhan nasional

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Digital, maka Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja dan target kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

No	Kinerja	Indikator Kinerja		Target 2024	Capaian 2024
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%

No	Kinerja	Ind	ikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	
		2	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	
		3	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%	
	(lanjutan) Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Meningkatnya Layanan	4	Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%
(lanjutan) 1		5	Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100%	
		6	Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	100%	
			7	Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%

No	Kinerja	Indi	kator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024
(lanjutan) 1	(lanjutan) Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	8	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%
		9	Persentase (%) Sosialisasi/Bimbi- ngan Teknis SRC/LRC	100%	100%
		10	Persentase (%) ISR Maritim Nelayan program MOTS-IKRAN	100%	100%
		11	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR	100%	100%

No	Kinerja	Indikator Kinerja		Target 2024	Capaian 2024
	Meningkatnya	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT Jakarta Tahun 2024	89	90.97
2	Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	2	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100	100

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar *Rp. 19.721.391.000,00* (Sembilan belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



A. Capaian Kinerja Organisasi

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Infradigi mendukung sepenuhnya program dan sasaran kinerja serta Indikator Kinerja Program (IKP) yang disusun oleh Ditjen Infradigi, yaitu:

- 1.Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
- 2.Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Adapun sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut:

- 1.Tersedianya infrastruktur TIK dan pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
- 2.Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.
- 3. Terwujudnya tata kelola Ditjen Infradigi yang bersih, efisien dan efektif.

Untuk mencapai tujuan dari program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sasaran Program yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1.Mengetahui legalitas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat/Perangkat Telekomunikasi (APT) di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta (Balmon Jakarta) yaitu DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor;
- 2.Mengetahui kesesuaian penggunaan SFR dan APT dengan izin yang berlaku;
- 3.Penanganan gangguan SFR dapat dilaksanakan dengan hasil yang maksimal;
- 4. Melakukan penertiban penggunaan SFR dan APT berdasarkan hasil inspeksi, penanganan gangguan dan pengukuran;
- 5. Kesesuaian data frekuensi pada Izin Stasiun Radio (ISR) dengan frekuensi aktual pada *site/on the spot* berdasarkan hasil observasi monitoring;
- 6.Pemeliharaan perangkat SMFR Stasiun Tetap, *Transportable*, Bergerak dan Jinjing;

Secara lengkap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%)_Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring penggunaan SFR di Kab/Kota pada Tahun 2024 memiliki target sebesar 100%. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mampu memonitor seluruh komponen yang dihitung pada perhitungan capaian untuk memenuhi 1 Kabupaten/Kota termonitor di tahun 2024.

Hasil yang didapatkan pada tahun 2024 yaitu 100% Kabupaten/Kota atau sejumlah 11 Kabupaten/Kota termonitor, sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Kelas I Jakarta mampu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan capaian indikator kinerja di atas dapat kami rincikan pula kegiatan sebagai berikut:

1. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta terdiri dari 11 Kabupaten/Kota yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kepulauan Seribu. Data pengguna Izin Stasiun Radio (ISR) pada Tahun 2024 yang didapatkan dari data SIMS pada Bulan Januari adalah sebanyak 39.218 ISR yang dimiliki oleh 601 pengguna di Wilayah DKI Jakarta dan 31.621 ISR yang dimiliki oleh 277 pengguna di Wilayah BODEBEK. Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital melalui Nota Dinas No. 1083/DJSDPPI.4/PR.04.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Tahun 2024 menyampaikan sebagai berikut:

 15 pita frekuensi yang harus dimonitor selama tahun 2024 oleh setiap UPT Ditjen Infradigi melalui kegiatan observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio dan pengukuran parameter teknis dengan menggunakan Stasiun Tetap/Transportable dan/atau Stasiun Jinjing/Bergerak:

No	Subservice	Pita Frekuensi (MHz)
1	Radio FM, DRM *INS04	87 - 108
2	Penerbangan VHF *INS36	108 - 137
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 - 174
4	DRM, DAB *INS05	174 - 230
5	Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS0D, Marabahaya *INS36	300 - 430
6	Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 - 460
7	Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 - 470
8	Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 - 806
9	Trunking *INS14, Downllink Seluler 800 *INS15	806 - 880
10	Downlink Seluler 900 *INS16	925 - 960
11	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A	1427 - 1518
12	Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 - 1880
13	Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 - 2170
14	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22	2170 - 2200
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	2300 - 2400

 5 pita frekuensi marabahaya yang harus dimonitor selama tahun 2024 oleh setiap UPT Ditjen Infradigi melalui kegiatan observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio menggunakan Stasiun Tetap/Transportable pada setiap hari kerja. Adapun 5 pita frekuensi marabahaya yang dimaksud tertera pada tabel di bawah ini:

No	Service	Pita Frekuensi		Stepwidth		Durasi
NO	Service	(MHz)	R&S	TCI	LS Telcom	Durasi
1	Radionavigasi Penerbangan	108 - 117.975	6.25 kHz	6.25 kHz	4.88 kHz	
2	Bergerak Penerbangan	117.975 - 137	6.25 kHz	6.25 kHz	4.88 kHz	
3	Bergerak Maritim (Panggilan & DSC Marabahaya)	156.4875 - 156.8125	500 Hz	5 kHz	0.31 kHz	Menyesuaikan Karakteristik Pancaran
4	Tetap, Bergerak	235 - 267	6.25 kHz	6.25 kHz	4.88 kHz	
5	Satelit-Bergerak (Bumi ke Angkasa)	406 - 406.1	500 Hz	5 kHz	0.31 kHz	



Padatnya pengguna ISR pada Wilayah Jabodebek menunjukkan bahwa spektrum frekuensi radio sangat dibutuhkan dalam penggunaan sehari-hari. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam strategis yang terbatas, oleh karena itu penggunaannya diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio maka dipandang perlu dilakukan kegiatan monitoring pendudukan pita frekuensi radio (okupansi).

Monitoring pendudukan pita frekuensi radio (okupansi) merupakan bagian dari kegiatan monitoring untuk memantau penggunaan spektrum frekuensi pada pita tertentu di wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan sarana perangkat monitor jinjing/bergerak maupun stasiun tetap/transportable melalui pengamatan sekurang-kurangnya 4 (empat) jam untuk subservice 1 s.d. 9 dan 30 (tiga puluh) menit untuk untuk subservice 10 s.d. 15 dengan merekam kanal, level serta waktu pendudukannya.

Monitoring rutin pita frekuensi marabahaya dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau ancaman yang berisiko terhadap keselamatan atau keamanan menggunakan sarana perangkat stasiun tetap/transportable melalui pengamatan dengan durasi menyesuaikan karakteristik pancaran.

Kegiatan tersebut diatas dilakukan untuk mengetahui kepadatan pengguna spektrum frekuensi radio di Wilayah Jabodebek serta mengetahui ada tidaknya pancaran pada pita frekuensi marabahaya sehingga spektrum frekuensi radio dapat dipergunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari gangguan yang merugikan

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama Tahun 2024 dengan target capaian 100% (merujuk ND No. 1083/DJSDPPI.4/PR.04.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Tahun 2024):

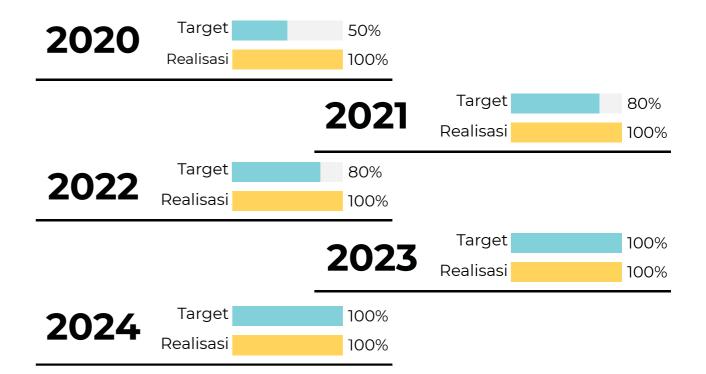
A. Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota:

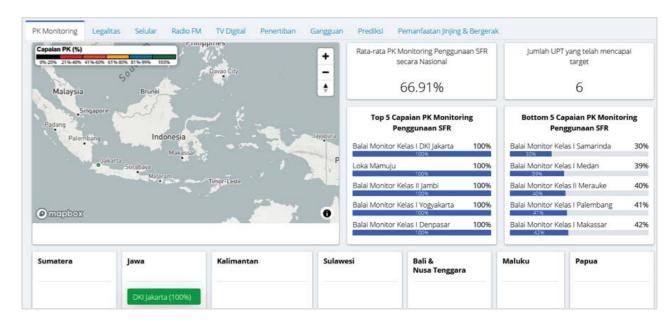
- 100% Kab/Kota Termonitor.
- Okupansi 15 pita frekuensi dilakukan dengan observasi dan identifikasi mengacu kepada data SIMS di masing – masing wilayah kerja UPT dan data referensi lainnya yang dapat diakses pada tautan https://komin.fo/reflain2024.
- Memonitor 50% dari ISR yang telah ditetapkan dengan mengacu data pada Aplikasi New Report Online (ROL).
- 70% Hasil monitoring SFR harus teridentifikasi.

B. Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya

- 60% dari total hari kerja setiap SMFR Tetap/Transportable di Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan observasi dan identifikasi.
- 5 pita frekuensi marabahaya, dilakukan observasi dan identifikasi dengan mengacu kepada data SIMS di masing masing wilayah kerja UPT dan data referensi lainnya pada tautan : https://komin.fo/reflain2024.

3. Capaian Tahun 2020-2024 (Monitoring Penggunaan SFR di Kab/Kota)



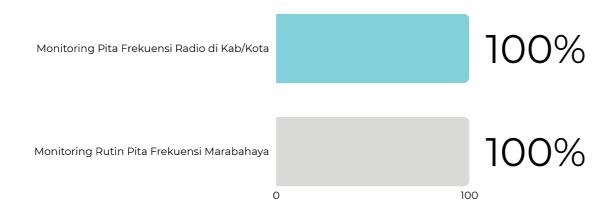


Capaian PK Monitoring Penggunaan SFR di Kab/Kota Tahun 2024 (sumber data: rol.postel.go.id)

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mampu merealisasikan capaian pada seluruh komponen yang dihitung dalam perhitungan capaian kinerja pada Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya pada tahun 2024, sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Kelas I Jakarta mampu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

A. Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota:

 Monitoring pendudukan pita frekuensi radio (okupansi) dilakukan di 11 Kabupaten/Kota dengan 15 pita frekuensi telah termonitor pendudukannya.



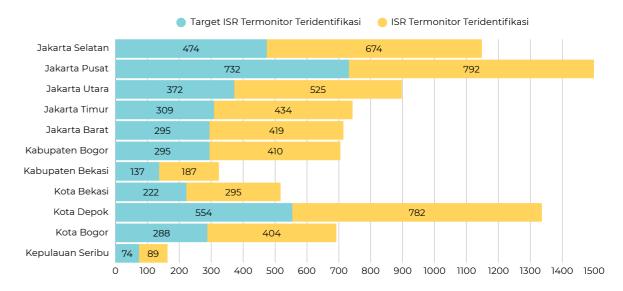
Capaian PK Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kab/Kota Tahun 2024 (sumber: rol.postel.go.id)

- Seluruh Kab/Kota telah dimonitor dengan rincian: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, dan Kepulauan Seribu.
- Jumlah ISR yang termonitor dari 11 Kabupaten/Kota sebanyak 2214 ISR dari target ISR yang termonitor sebanyak 1183 ISR, yang digambarkan dengan grafik di bawah ini.



Capaian ISR Termonitor Tahun 2024 (sumber: rol.postel.go.id)

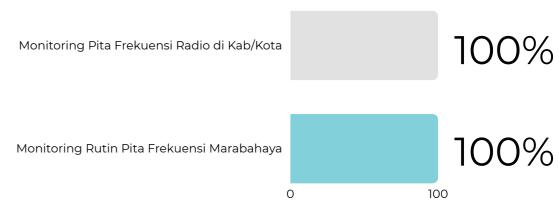
• Jumlah ISR termonitor yang teridentifikasi sebanyak 5011 ISR termonitor dari target minimal sebanyak 3757 ISR termonitor yang teridentifikasi, seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini:



Capaian ISR Termonitor Teridentifikasi Tahun 2024 (sumber: rol.postel.go.id)

B. Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya

 Setiap SMFR Tetap/Transportable telah melakukan observasi dan identifikasi paling sedikit 60% dari total hari kerja selama tahun 2024, sehingga Dalam 1 (satu) bulan setiap SMFR Tetap/Transportable telah minimal melaporkan hasil monitor pita frekuensi marabahaya sebanyak 14x.



Capaian PK Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya Tahun 2024 (sumber: rol.postel.go.id)

• Okupansi 5 pita frekuensi marabahaya telah dilakukan dengan observasi dan identifikasi mengacu kepada data SIMS di wilayah Jabodebek.









Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota Tahun 2024



Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota Tahun 2024

4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

A. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan:

- Peralatan monitoring yang digunakan telah memadai dan mencakup rentang frekuensi yang luas dan memiliki sensitivitas yang baik untuk melakukan monitoring pada 15 pita frekuensi radio.
- Personel yang terlibat dalam kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup memadai dalam hal pemantauan dan analisis spektrum frekuensi radio. Hal ini didapatkan dari pelatihan teknis berkala yang diikuti sehingga meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan teknologi.
- Adanya peraturan dan kebijakan yang jelas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengatur penggunaan spektrum frekuensi serta pada tahun ini telah diterapkan sanksi administratif bagi pelanggaran IPFR, ISR, dan APT.
- Ketersediaan data yang akurat tentang alokasi frekuensi, pengguna, dan lokasi pemancar yang terintegrasi dan terupdate dan dapat diakses oleh UPT sehingga memudahkan kegiatan monitoring di lapangan.
- Telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan frekuensi radio yang legal dan tertib.
- Strategi sangat penting dalam melaksanakan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio dengan efektif. Adapun strategi yang disusun meliputi: perencanaan kegiatan, pembagian personal, penentuan perangkat monitoring, dan penentuan lokasi monitoring.

B. Kendala yang Dihadapi

- Wilayah DKI Jakarta yang padat penduduknya dengan banyak bangunan tinggi dapat menyulitkan deteksi sinyal frekuensi yang terjadi. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan jumlah titik pemantauan di lokasi-lokasi strategis, seperti di atap gedung tinggi atau tempat-tempat yang memiliki jangkauan luas, untuk mengurangi blind spot dalam pemantauan, serta melakukan koordinasi lebih intensif dengan operator dan penyelenggara layanan frekuensi untuk memastikan mereka mematuhi aturan terkait daya pancar dan lokasi penggunaan frekuensi, serta meminimalkan gangguan akibat interferensi.
- Beberapa peralatan monitoring stasiun tetap yang dimiliki oleh Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta mengalami kerusakan, sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah melakukan perbaikan dan digantikan dengan peralatan monitoring portable.
- Keterbatasan akses lokasi kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio di wilayah BODEBEK yang tidak bisa/sulit dijangkau dengan menggunakan mobil unit monitoring. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah menggunakan mobil oprasional dengan dilengkapi peralatan monitoring jenis handheld.

C. Rekomendasi

Langkah-langkah yang perlu diambil pada tahun 2025 adalah untuk memperkuat dan mengembangkan hasil yang sudah dicapai pada tahun 2024, serta mengoptimalkan efektivitas pemantauan di tahun berikutnya:

- Program pelatihan dan sertifikasi bagi petugas yang terlibat dalam monitoring harus dilanjutkan dan diperbaharui dengan keterampilan yang sesuai dengan teknologi terbaru. Fokus pada teknologi seperti 5G, Internet of Things (IoT), dan Software-Defined Radio (SDR) yang dapat meningkatkan efisiensi monitoring.
- Mengintegrasikan berbagai sistem pemantauan yang sudah ada (stasiun fixed/transportable) lintas UPT untuk menciptakan sistem yang lebih efektif, sehingga petugas dapat lebih mudah mengakses data terkait pemantauan spektrum frekuensi.

5. Tindak Lanjut

- Telah dilakukan evaluasi terhadap peralatan monitoring yang digunakan untuk memastikan bahwa peralatan tersebut memenuhi standar dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan frekuensi radio. Peralatan yang tidak memadai telah diganti dengan yang lebih baik.
- Pelatihan/diklat teknis personel secara rutin untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam melakukan kegiatan monitoring frekuensi radio. Hal ini dapat membantu personel memahami peralatan monitoring dengan lebih baik, memperbaiki kemampuan analisis, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan monitoring.
- Peningkatan akses dan pemahaman data tentang penggunaan frekuensi radio dapat membantu dalam memperbaiki indikator monitoring frekuensi radio. Data dan informasi yang akurat dan terbaru sangat penting untuk melakukan pemantauan yang efektif.
- Perkembangan teknologi yang cepat telah diikuti untuk memperbaiki kegiatan monitoring frekuensi radio. Peralatan monitoring yang lebih baru dan lebih canggih untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan monitoring.
- Koordinasi yang lebih baik dengan pengguna frekuensi radio untuk memahami kebutuhan dan penggunaan frekuensi radio dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu dalam menentukan jenis frekuensi radio yang harus dipantau dan cara terbaik untuk melakukan pemantauan.

6. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLA

A. Berorientasi Pelayanan

Diementasi Budaya Nilai BerARTLA Beroriental Pelgyanan Akuntabel Kom Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan monitoring frekuensi radio telah memiliki sikap yang berorientasi pada pelayanan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif kepada pengguna frekuensi radio.

B. Akuntabilitas

Personel telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam kegiatan monitoring frekuensi radio, dengan melaporkan hasil monitoring secara transparan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

C. Kompetensi

Personel telah memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan kegiatan monitoring frekuensi radio dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan secara berkala.

D. Harmonis

Personel mampu menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan pengguna frekuensi radio dan dengan rekan kerja di lingkungan kerja. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kegiatan monitoring dan meminimalkan konflik yang tidak perlu.

E. Loyalitas

Personel memiliki loyalitas terhadap organisasi dan mematuhi etika dan kode etik yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membantu memastikan kegiatan monitoring frekuensi radio dilakukan dengan jujur dan adil.

F. Adaptif

Personel mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan teknologi yang terjadi, sehingga kegiatan monitoring frekuensi radio dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

G. Kolaboratif

Personel mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan monitoring frekuensi radio. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kegiatan monitoring dan memastikan bahwa kegiatan monitoring dilakukan secara komprehensif.

7. Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kab/kota, dilakukan beberapa cara berikut:

 Personel yang terlibat dalam kegiatan monitoring frekuensi radio telah diberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Pelatihan juga dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas.

- Sistem pemantauan jarak jauh (remote system) pada peralatan stasiun monitor fixed dan transportable dalam kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio untuk melakukan okupansi pada 15 pita frekuensi radio lebih efisien daripada pemantauan langsung oleh personel ke lapangan. Pemantauan jarak jauh juga dapat membantu mengidentifikasi sinyal radio yang tidak berizin dan interferensi dengan cepat dan akurat.
- Sistem pelaporan online (report online) yang digunakan dalam kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio membantu petugas di lapangan dalam melakukan pelaporan secara efisien dan tepat waktu sehingga data monitoring dapat segera diidentifikasi penggunanya.

Dengan menerapkan beberapa cara di atas, maka efisiensi sisi sumber daya manusia, efisiensi waktu pelaksanaan maupun efisiensi pelaporan dalam kegiatan monitoring frekuensi radio dapat tercapai.

8. Benchmarking dengan UPT Lain

Nama UPT	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Pengguna (ISR)	Luas Wilayah (km2)	Capaian
Balmon Jakarta	11	70.839	4934.4	100%
Balmon Tagerang	8	28.657	9160.7	100%

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Balmon Jakarta memiliki jumlah kab/kota dan pengguna ISR yang lebih banyak daripada Balmon Tangerang meskipun dengan luas wilayah yang lebih kecil. Namun secara kinerja baik Balmon Jakarta maupun Balmon Tangerang sama-sama dapat mencapai target kinerja sebesar 100%. Dalam hal ini Balmon Jakarta diharapkan dapat terus mempertahanan hasil capaian kinerja meskipun dengan tantangan pengguna ISR yang sangat padat dibandingkan dengan Balmon lainnya.

2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase(%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) memiliki target realisasi sebesar 80% dan 20% Monitoring Perangkat. Capaian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta pada tahun 2024 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula kegiatan sebagai berikut:

1. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna spektrum

Target pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) yang telah ditentukan oleh Direktorat pengendalian pada tahun 2024 adalah 4129 target data yang dilakukan pemeriksaan melalui remote site dan 1795 target data yang dilakukan inspeksi open shelter. Pada layanan siaran, khususnya subservis radio siaran FM dan TV Siaran target pemeriksaan adalah seluruh stasiun telah terukur dengan rincian 62 radio siaran FM dan 13 TV siaran digital. Sedangkan untuk monitoring alat/perangkat telekomunikasi ditetapkan target sebanyak 8 kali pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun dengan minimal 3 jenis perangkat prioritas dimonitor per kegiatan.

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) merupakan tindak lanjut pengawasan dan pembinaan terhadap pengguna frekuensi radio yang telah dilakukan monitoring. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengguna frekuensi radio telah mempunyai Izin Stasiun Radio (ISR), menggunakan alat/perangkat telekomunikasi yang terlah bersertifikat, dan memastikan data teknis dan dokumen ISR sesuai dengan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga tercipta penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efektif, efisien, dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari gangguan yang merugikan.

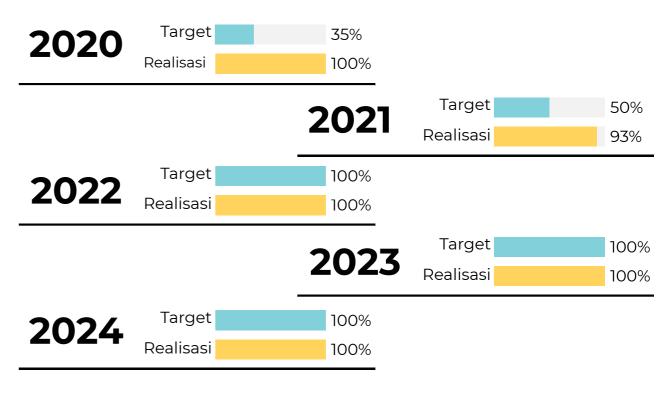
2. Sasaran Kegiatan

Berikut sasaran kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) di Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta selama Tahun 2024 dengan target capaian 100% (merujuk ND No. 1083/DJSDPPI.4/PR.04.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Tahun 2024):

- Melaksanakan pemeriksaan Microwave Link sebanyak 4129 target data ISR melalui kegiatan remote site.
- Melaksanakan pemeriksaan Microwave Link sebanyak 1795 target data ISR melalui kegiatan inspeksi open shelter.
- Mengukur parameter teknis subservis radio siaran FM dan TV Siaran Digital sebanyak 75 penyelenggara dengan rincian 62 ISR penyelenggara radio siaran FM Jabodebek dan 13 ISR penyelenggara televisi siaran digital.

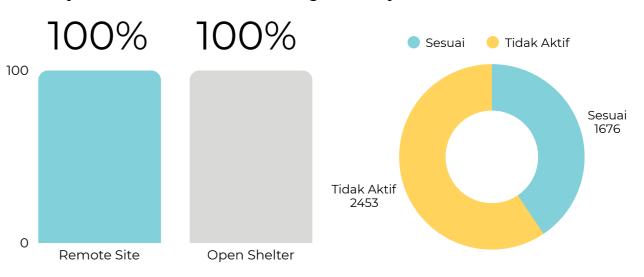
 Melaksanakan kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi sebanyak 8 kali dalam setahun dengan minimal 3 jenis perangkat prioritas dimonitor per kegiatan.

3. Capaian Target Tahun 2020-2024 (Pemeriksaan Stasiun Radio)



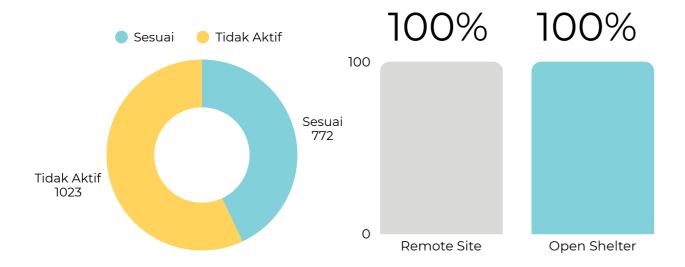
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mampu menyelesaikan seluruh target pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) di tahun 2024, sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Kelas I Jakarta mampu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

• Telah dilakukan pemeriksaan Microwave Link melalui kegiatan remote site sebanyak 4129 data ISR dari total target sebanyak 4129 data ISR.



Capaian Remote Site Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta Tahun 2024 (sumber: apstard.postel.go.id)

 Telah dilakukan pemeriksaan Microwave Link melalui kegiatan inspeksi open shelter sebanyak 1795 data ISR dari total target sebanyak 1795 data ISR.



Capaian Open Shelter Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta Tahun 2024 (sumber: apstard.postel.go.id)









Kegiatan Pemeriksaan Microwave Link dengan Metode Open Shelter Tahun 2024



Kegiatan Pemeriksaan Microwave Link dengan Metode Remote Site Tahun 2024

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mampu menyelesaikan seluruh target pengukuran parameter teknis sejumlah 62 stasiun Radio Siaran FM dan 13 stasiun MUX TV Digital di tahun 2024, sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Kelas I Jakarta mampu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENYELENGGARA TV SIARAN DIGITAL	KAB BOGOR	KOTA BEKASI	KAB BEKASI	JAKARTA BARAT
1	PT SURYA CITRA TELEVISI (MUX SCTV JAKARTA KEMBANGAN)				1
2	PT SURYA CITRA TELEVISI (MUX SCTV HAMBALANG)	1			
3	PT SURYA CITRA TELEVISI (MUX SCTV BEKASI)		1		

NO	NAMA PENYELENGGARA TV SIARAN DIGITAL	KAB BOGOR	KOTA BEKASI	KAB BEKASI	JAKARTA BARAT
4	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (STASIUN TRANSMISI TVRI JOGLO)			1	
5	PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI KEBON JERUK)				1
6	PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI BEKASI)			1	
7	PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA (RCTI BOGOR)	1			
8	PT MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV)			1	
9	PT LATIVI MEDIA KARYA (TV ONE)			1	
10	PT TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA (TRANS TV)			1	
11	PT METROPOLITAN TELEVISINDO (SFN JAKARTA)				1

NO	NAMA PENYELENGGARA TV SIARAN DIGITAL	KAB BOGOR	KOTA BEKASI	KAB BEKASI	JAKARTA BARAT
12	PT METROPOLITAN TELEVISINDO (SFN GN GEULIS)	1			
13	PT METROPOLITAN TELEVISINDO (SFN CIKARANG)			1	
	TOTAL	3	1	6	3

Capaian Pengukuran TV Digital Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta Tahun 2024 (sumber: rol.postel.go.id)



Capaian Pengukuran TV Digital dan Radio FM Tahun 2024 (sumber: apstard.postel.go.id)





Kegiatan Pengukuran Stasiun Radio Siaran FM Tahun 2024





Kegiatan Pengukuran Stasiun MUX TV Digital Tahun 2024

Telah dilakukan kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi sebanyak 15 kali, dari 213 perangkat yang dimonitor didapatkan hasil 204 perangkat bersertifikat dan 9 perangkat tidak memiliki sertifikat sebagai berikut:

No	Nama Perangkat	Merk	Model/Tipe
1	Switch	Tenda	TEH2400M
2	Router	D-LINK	DGS-1024C
3	Switch	Cisco	SRW2024
4	Switch	Cisco	Catalyst 2950
5	Fiber Media Converter	Optone	OPT-1100
6	Fiber Media Converter	HiS Focus	CSIPIG
7	GPON	China Mobile	GM 630
8	PoE Switch	JG-TECH	JGT-12GPOE
9	REPEATER BAND SELECTIVE 900MHZ/ 1800MHZ/ 2100MHZ	Mobile Tri Band Repeater	-









Kegiatan Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun 2024

4. Inovasi/Analisa keberhasilan/Ketidaktercapaian

A. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan:

- Teknologi alat ukur yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio yakni spectrum analyzer dan TV analyzer merupakan peralatan yang canggih dan akurat serta dilengkapi dengan antenna portable dan mobil monitoring yang lengkap.
- Petugas lapangan yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam analisis spektrum.
- Data dan informasi yang lengkap dapat membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio yang meliputi: database SIMS/ISR, data parameter teknis stasiun radio, data spesifikasi teknis perangkat pemancar, dan data sertifikat perangkat pada aplikasi SERTIFIKAT NEXTGEN maupun SIRANI.
- Strategi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio meliputi: perencanaan kegiatan yang matang, persiapan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio, pembagian personel, penentuan lokasi pemeriksaan dan pengukuran, dan evaluasi kegiatan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki di masa depan.

B. Kendala yang Dihadapi:

- Jakarta memiliki kepadatan pemancar dari berbagai jenis layanan serta peredaran perangkat telekomunikasi yang sangat bervariasi sehingga data frekuensi yang diterima spektrum maupun data peredaran perangkat di lapangan harus selalu dianalisa karena sangat kompleks.
- Alur informasi dalam memperoleh data yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan, seperti data perizinan atau akses ke data frekuensi radio milik pengguna atau penyelenggara yang masih belum jelas.
- Birokrasi yang panjang dalam melakukan koordinasi dengan pengguna atau penyelenggara.

C. Rekomendasi

Langkah-langkah yang perlu diambil pada tahun 2025 untuk memperkuat dan mengembangkan hasil yang sudah dicapai pada tahun 2024, serta mengoptimalkan efektivitas pemeriksaan stasiun radio di tahun berikutnya:

- Melakukan evaluasi mendalam terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada tahun 2024, termasuk temuan frekuensi yang sering terjadi pelanggaran dan wilayah yang banyak ditemukan pelanggaran.
- Menyusun daftar masalah yang perlu perhatian lebih, misalnya dititiktitik yang masih sering terdeteksi gangguan atau memerlukan pemantauan lebih intensif.
- Menambah jumlah personel yang dilibatkan dalam pemeriksaan dan pemantauan, terutama untuk wilayah Jakarta yang padat dan kompleks.
- Melakukan pelatihan lebih lanjut untuk tim teknis dan sesi pembelajaran internal, terutama dalam hal penggunaan alat monitoring terbaru dan penanganan pelanggaran spektrum dan berbagi pengalaman dan kasus-kasus yang terjadi di lapangan untuk meningkatkan kemampuan tim.

5. Tindak Lanjut

- Telah dilakukan evaluasi kinerja pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio sudah efektif.
- Mengidentifikasi permasalahan dan strategi yang ada pada proses pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio dengan memeriksa laporan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio sebelumnya meliputi: perencanaan kegiatan yang matang, persiapan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio, pembagian personel, penentuan lokasi pemeriksaan dan pengukuran, dan evaluasi kegiatan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki di masa depan.
- Telah dilakukan perbaikan berupa perubahan proses bisnis pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio serta penyesuaian jumlah personel dan peralatan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio.
- Melaksanakan sosialisasi terkait perizinan dan sertifikasi secara berkala kepada ruang lingkup yang beragam pengguna frekuensi agar pengguna memahami pentingnya memiliki izin, cara memperolehnya, serta sanksi yang berlaku jika melanggar aturan penggunaan frekuensi.



A. Berorientasi Pelayanan

Pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang jelas dan efisien, memastikan pelayanan kepada masyarakat dan operator radio dilakukan dengan waktu yang tepat tanpa mengurangi kualitas hasil pemeriksaan.

B. Akuntabilitas

Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi dan tindak lanjut yang diberikan harus adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Kompetensi

Petugas harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peraturan frekuensi radio dan dapat mengidentifikasi pelanggaran dengan akurat.

D. Harmonis

Pendekatan yang diambil dalam pemeriksaan harus mengedepankan solusi dan menghindari konfrontasi. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada komunikasi yang baik antara petugas dan pemilik stasiun radio untuk mencari solusi terbaik.

E. Loyalitas

Setiap tindakan dalam pemeriksaan harus dilaksanakan dengan integritas tinggi dan menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi institusi atau melanggar kode etik.

F. Adaptif

Memiliki kemampuan untuk menyesuaikan strategi pemeriksaan sesuai dengan kondisi lapangan yang dinamis, baik dari segi lokasi pemeriksaan maupun jenis pelanggaran yang muncul.

G. Kolaboratif

Melibatkan masyarakat dalam pemantauan dengan menyediakan kanal pelaporan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga penggunaan spektrum frekuensi yang sah dan aman.

7. Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio, dilakukan beberapa cara berikut:

- Personel yang terlibat dalam kegiatan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio telah diberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. Pelatihan juga dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas.
- Sistem remote site pada Network Monitoring System (NMS) operator dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) lebih efisien daripada pemeriksaan langsung oleh personel di lapangan. Sistem remote site pada Network Monitoring System (NMS) juga dapat membantu mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai dan/atau tidak memiliki ISR secara real time.
- Koordinasi dengan stakeholder terkait seperti operator seluler dan penyelenggara telekomunikasi dapat membantu memastikan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir overlapping dan mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan monitoring.
- Sistem pelaporan secara on line yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio antara yakni APSTARD dan SMART dapat membantu petugas di lapangan dalam melakukan pelaporan secara efisien dan tepat waktu.

Dengan menerapkan beberapa cara di atas, maka efisiensi sisi sumber daya manusia, efisiensi waktu pelaksanaan dan efisiensi pelaporan dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio dapat tercapai.

8. Benchmarking dengan UPT Lain

Nama UPT	Target Remote Site	Target Open Shelter	Target Radio FM	Target TV Digital	Jumlah Perangkat Termonitor	Capaian
Balmon Jakarta	4129	1795	62	13	213 (15 Kali Kegiatan)	100%
Balmon Tangerang	1770	777	62	13	317 (10 Kali Kegiatan)	100%

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Balmon Jakarta memiliki hasil monitoring perangkat yang lebih sedikit dibandingkan dengan Balmon Tangerang, meskipun telah melaksanakan lebih banyak kegiatan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kuantitas hasil perangkat yang dimonitor per kegiatan. Dalam hal ini Balmon Jakarta dapat menjadikan capaian Balmon Tangerang sebagai motivasi untuk terus memaksimalkan hasil kinerja monitoring perangkat dari segi kuantitas perangkat yang dimonitor sehingga kinerja monitoring perangkat dapat menjadi lebih baik kedepannya.

3. Persentase (%) Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase (%) Penanganan Gangguan SFR memiliki target realisasi sebesar 100%. Capaian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta pada tahun 2024 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula kegiatan sebagai berikut:

1. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

Penggunaan frekuensi radio yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi mengakibatkan permasalahan dikarenakan penggunaan frekuensi radio sangat beragam. Peningkatan penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut seharusnya diikuti dengan kesadaran untuk melakukan pengurusan izin, menggunakan frekuensi radio secara tertib, aman, tidak saling mengganggu, dan sesuai ketentuan teknis, serta menggunakan perangkat yang telah disertifkasi/distandarisasi oleh Ditjen Infradigi Kemkominfo. Dampak dari ketidaksadaran dan penyalahgunaan pemakaian frekuensi radio maupun perangkat telekomunikasi tersebut seringkali menimbulkan gangguan frekuesi radio antar pengguna frekuensi radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas dan pengendali terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio serta senantiasa harus siap sedia dalam melakukan penanganan gangguan frekuensi radio terhadap pengguna frekuensi radio yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya yang berada di wilayah kerjanya.

Penanganan gangguan frekuensi radio merupakan salah satu bentuk nyata pelayanan yang dilakukan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta terhadap pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), maupun pengguna Non Pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) dalam mengatasi gangguan akibat interferensi frekuensi radio. Kegiatan yang dilakukan berupa penerimaan dan penyelesaian laporan aduan gangguan frekuesni radio dari pengguna dan penyelenggara telekomunikasi serta stakeholder terkait di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta.

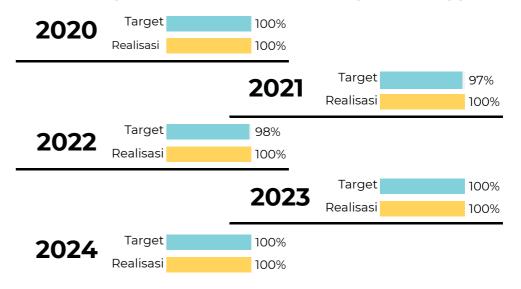
Penanganan gangguan dimaksudkan untuk menemukenali dan mendeteksi stasiun radio dan pengguna frekuensi radio yang mengganggu dan menginterferensi pada pita frekuensi radio yang digunakan oleh pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), maupun pengguna Non Pemegang Izin Stasiun Radio (ISR). Hal ini ditujukan untuk mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang teratur, tertib, efektif, efisien, dan optimal, melakukan aktifitas pancaran frekuensi radio setelah memiliki ISR, menggunakan frekuensi radio sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari potensi interferensi dan saling mengganggu.

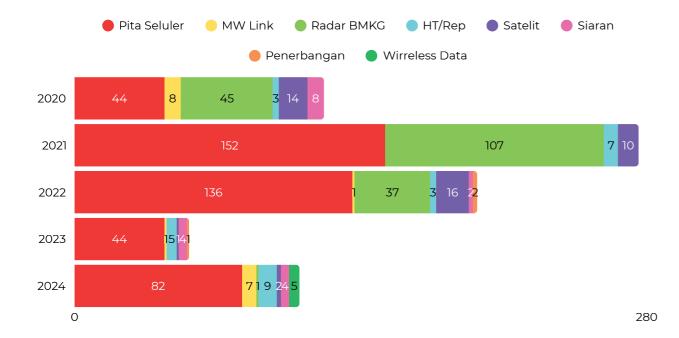
2. Sasaran Kegiatan

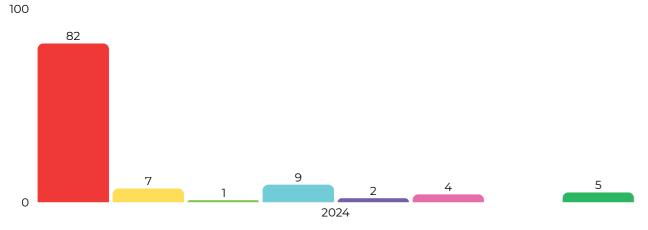
Berikut sasaran kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama Tahun 2024 dengan target capaian 100% (merujuk ND No.1083/DJSDPPI.4/PR.04.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Tahun 2024):

- Menangani 100% aduan gangguan frekuensi radio yang dilaporkan melalui aplikasi Trouble Ticket.
- Melaporkan hasil penanganan gangguan melalui aplikasi Trouble Ticket.

3. Capaian Target Tahun 2020-2024 (Penanganan Gangguan SFR)

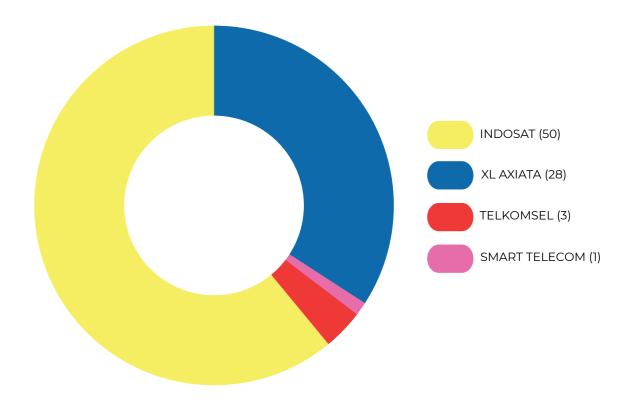






Hasil Penanganan Gangguan Tahun 2020-2024 (sumber: laporgangguansfr.postel.go.id)

Aduan gangguan yang paling banyak ditangani pada Tahun 2024 adalah gangguan pada frekuensi IPFR milik operator seluler sebanyak 82 aduan gangguan atau sejumlah 74.54% dari total seluruh gangguan. Gangguan ini banyak terjadi disebabkan oleh penggunaan perangkat penguat sinyal (repeater) handphone, Access Point, dan Perangkat illegal (tidak berizin) yang masih banyak dijual secara bebas di pasaran dengan harga yang relatif murah. Spesifikasi perangkat repeater handphone, Access Point, dan Jammer illegal tersebut dapat menimbulkan gangguan diakibatkan frekuensi kerjanya tidak sesuai dengan standar frekuensi Mobile Broad Band yang digunakan di Indonesia.



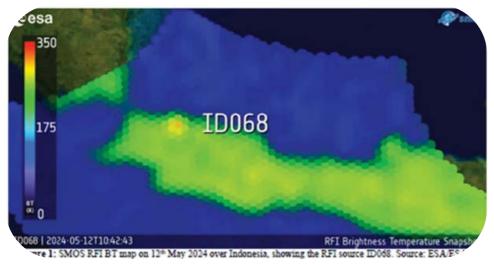
Hasil Penanganan Gangguan IPFR Tahun 2024 (sumber: laporgangguansfr.postel.go.id)

- Tidak ada gangguan penerbangan pada Tahun 2024. Gangguan penerbangan merupakan prioritas gangguan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 1x24 jam karena merupakan gangguan terhadap sistem komunikasi radio yang membahayakan keselamatan jiwa manusia.
- Gangguan pada Radar BMKG yang ditangani pada Tahun 2024 sebanyak 1 aduan. Gangguan ini menyebabkan kesalahan dalam interpretasi citra radar cuaca pada kondisi-kondisi tertentu yang berdampak pada menurunnya kualitas layanan informasi cuaca penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta sehingga dapat membahayakan keselamatan penerbangan.



Gangguan pada Citra Radar Cuaca BMKG Stamet Kelas I Soekarno-Hatta Tangerang (sumber: Stamet Kelas I Soekarno-Hatta Tangerang)

Gangguan ini disebabkan oleh penggunaan frekuensi RLAN pada pita frekuensi BMKG (5570-5670 MHz). Aduan gangguan tersebut dapat ditangani sampai tidak ditemukenali Kembali gangguan pada titik tersebut (clear) melalui proses penertiban berupa penghentian pancaran perangkat RLAN yang bekerja pada frekuensi yang digunakan oleh BMKG.



Gangguan pada Satelit SMOS di Wilayah Jakarta (sumber: ESA/ESAC)

 Gangguan pada satelit yang ditangani pada Tahun 2024 sebanyak 1 aduan. Gangguan ini menyebabkan dampak secara langsung pada kualitas data ilmiah satelit SMOS milik Negara Prancis pada frekuensi 1413.5 MHz.

Gangguan ini disebabkan oleh perangkat BTS milik PT. Telekomunikasi Seluler dengan merk Huawei ASI4518R42v06 yang menimbulkan spurious pada frekuensi 1400-1427 MHz. Bekerja sama dengan stakeholder terkait, perangkat yang menimbulkan gangguan tersebut telah dihentikan pancarannya (off air) sehingga tidak ditemukenali kembali gangguan pada titik tersebut (clear).

 Aduan gangguan lain berupa 9 aduan gangguan pada HT/Repeater, 7 aduan gangguan pada MW Link, 4 aduan gangguan pada radio siaran FM, 5 aduan gangguan pada dinas lain (wireless data) dan 2 aduan gangguan pada satelit. Seluruh aduan gangguan pada Tahun 2024 dapat ditangani sampai tidak ditemukenali Kembali gangguan pada titik tersebut (clear). Tindakan di lapangan berupa penghentian pancaran pengganggu, penyegelan, maupun pengamanan perangkat dilakukan dalam upaya menghentikan gangguan yang terjadi.











Kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024

4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

A. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan:

- Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta telah merespon dengan cepat dalam menangani pengaduan gangguan frekuensi radio. Hal ini dapat diukur dari waktu antara pengaduan gangguan dan waktu penanganan gangguan oleh tim.
- Peralatan monitoring yang ada di Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta menjadi penunjang kegiatan penanganan gannguan frekuensi dapat secara optimal dilakukan.
- Ketersediaan sumber daya seperti personel dalam menunjang kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio telah optimal. Personel yang terlibat dalam kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup memadai dalam hal pemantauan dan analisis spektrum frekuensi radio.
- Strategi dalam penanganan gangguan spektrum radio yang dilakukan antara lain sebagai berikut: menetapkan prioritas penanganan gangguan dimana gangguan terkait keselamatan dilaksanakan terlebih dahulu, pemantauan dalam rangka mendeteksi sumber gangguan spektrum frekuensi radio untuk mengidentifikasi sumber gangguan (suspect), analisis penyebab gangguan berupa pemeriksaan perangkat terganggu maupun pemantauan di sekitar lingkungan yang terganggu dan pengawasan terhadap penggunaan frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi yang harus memiliki ISR dan sertifikat perangkat untuk mencegah timbulnya gangguan spektrum frekuensi radio.

B. Kendala yang Dihadapi:

Terdapat tiga kendala yang dihadapi dalam menangani gangguan, antara lain:

- Kendala pada Penggunaan Frekuensi Radio yang Padat di Perkotaan
- Kendala pada Kurangnya Kooperatif dari Pihak Suspect
- Kendala pada Keterbatasan Akses Lokasi Gangguan

Ketiga-tiganya dikelompokkan menjadi kendala teknis dan kendala nonteknis, dengan penjelasannya seperti yang dijelaskan pada Tabel 1 s.d Tabel 3 berikut ini:

Analisis Kendala Teknis dan Non-Teknis

Tabel 1 – Kendala pada Penggunaan Frekuensi Radio yang Padat di Perkotaan

Jenis Kendala	Uraian Kendala				
Kendala Teknis	 Interferensi silang antar frekuensi (co-channel & adjacent-channel); Pantulan sinyal (multipath) akibat bangunan tinggi; Keterbatasan sensitivitas dan resolusi alat monitoring; Adanya sinyal sporadis seperti frequency hopping. 				
Kendala Non-Teknis	 Kurangnya koordinasi antar pengguna spektrum; Banyak pengguna belum paham aturan penggunas spektrum; Belum optimalnya database dan informasi perizina frekuensi secara real-time. 				

Tabel 2 - Kendala pada Keterbatasan Akses Lokasi Gangguan

Jenis Kendala	Uraian Kendala		
Kendala Teknis	 Mobil DF tidak dapat menjangkau area padat/sempit; Sinyal lemah atau tidak stabil di lingkungan tertutup; Akurasi handheld/portable DF lebih rendah dibanding alat fixed/vehicle-based. 		
Kendala Non-Teknis	 Lokasi berada di area permukiman padat, properti pribadi, atau zona terbatas; Personel lapangan terbatas; Butuh izin atau pendampingan untuk masuk area tertentu. 		

Tabel 3 - Kendala pada Kurangnya Kooperatif dari Pihak Suspect

Jenis Kendala	Uraian Kendala				
Kendala Teknis	 Perangkat gangguan dimatikan saat tim tiba, sehingga tidak terdeteksi; Sulit membuktikan pelanggaran tanpa rekaman/dokumentasi teknis di tempat 				
Kendala Non-Teknis	 Resistensi atau penolakan dari masyarakat/suspect; Keterbatasan kewenangan petugas monitoring untuk melakukan penindakan langsung; Kurangnya dukungan aparat hukum dalam pendampingan di lapangan. 				

C. Rekomendasi:

Langkah-langkah yang perlu diambil pada tahun 2025 adalah untuk memperkuat dan mengembangkan hasil yang sudah dicapai pada tahun 2024, serta mengoptimalkan efektivitas penanganan gangguan di tahun berikutnya:

- Melakukan evaluasi frekuensi dan jenis gangguan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Ini membantu dalam merencanakan langkahlangkah penanggulangan yang lebih efektif.
- Membentuk tim respons cepat yang terlatih dengan keterampilan yang diperlukan untuk menangani gangguan secara langsung dan efisien.
- Meningkatkan sistem monitoring dan pemantauan yang ada untuk mendeteksi gangguan lebih awal dan meminimalkan dampaknya.
- Mengevaluasi prosedur penanganan gangguan yang sudah ada.
 Pastikan proses tersebut cepat, terstandarisasi, dan responsif terhadap berbagai jenis gangguan.
- Menggunakan data dan analisis untuk mengidentifikasi tren gangguan, serta untuk merancang langkah-langkah preventif di masa depan.
- Memahami tren teknologi terbaru yang dapat mempengaruhi gangguan operasional dan perkuat kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.

5. Tindak Lanjut

- Telah dilakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta secara terus-menerus dan berkala.
- Meningkatkan koordinasi antara pengguna spektrum frekuensi radio dengan maksud dan tujuan untuk meminimalisir gangguan spektrum frekuensi radio.
- Memberikan kesadaran publik terkait tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi melalui kegiatan sosialisasi.



A. Berorientasi Pelayanan

Berorientasi pada pelayanan: Selalu mengutamakan kebutuhan dan kepentingan client dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kebijakan, prosedur, dan tindakan yang akan dilakukan untuk menangani gangguan tersebut. Selain itu, pastikan bahwa client dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah dan dapat memberikan masukan atau umpan balik terkait kualitas layanan yang diberikan melalui aplikasi Trouble Ticket.

B. Akuntabilitas

Memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan untuk menangani gangguan spektrum frekuensi radio dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini meliputi pelaporan secara terbuka tentang tindakan yang diambil dan hasil yang dicapai, serta memastikan bahwa pengguna spektrum radio yang melanggar aturan dikenakan sanksi yang sesuai.

C. Kompetensi

Memastikan personel yang bertanggung jawab untuk menangani gangguan spektrum frekuensi radio memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidang tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan yang terus menerus, serta memastikan bahwa staf memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan efektif.

D. Harmonis

Menerapkan prinsip-prinsip harmonis dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, meliputi koordinasi yang baik antara organisasi yang terlibat dalam pengelolaan spektrum radio, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk menangani gangguan tidak mengganggu kegiatan pengguna lain yang legal.

E. Loyalitas

Menunjukkan loyalitas kepada aturan yang berlaku seperti memberikan layanan dengan sepenuh hati dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi pengguna yang legal.

F. Adaptif

Kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio seringkali membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan prosedur dan strategi yang dapat menangani berbagai jenis gangguan, serta dengan terus mengembangkan dan memperbarui kebijakan dan prosedur sesuai dengan perubahan yang terjadi.

G. Kolaboratif

Membangun kerja sama dan kolaborasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

7. Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, dilakukan beberapa cara berikut:

- Meningkatkan pemantauan frekuensi radio secara terus-menerus menggunakan teknologi pemantauan otomatis dan jaringan pemantauan yang luas seperti stasiun fixed dan transportable untuk mendukung kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.
- Penggunaan sistem pelaporan gangguan frekuensi radio melalui aplikasi Trouble Ticket telah membantu meningkatkan efisiensi penanganan gangguan. Sistem Trouble Ticket memungkinkan pelaporan gangguan yang mudah dan cepat, serta memungkinkan penggunaan informasi yang dikumpulkan untuk mempercepat penanganan gangguan.

Dengan menerapkan beberapa cara di atas, maka efisiensi sisi sumber daya manusia, efisiensi waktu pelaksanaan serta efisiensi pelaporan dalam kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dapat tercapai.

8. Benchmarking dengan UPT Lain

Nama UPT	Jumlah Pengguna (ISR)	Jumlah Aduan Gangguan	Capaian
Balmon Jakarta	70.839	110	100%
Balmon Tagerang	28.657	18	100%

Berdasarkan data pada tabel dapat dilihat bahwa Balmon Jakarta memiliki jumlah aduan gangguan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Balmon Tangerang. Hal ini dapat terjadi karena jumlah pengguna ISR di wilayah Jabodebek sangat padat.

Dalam hal ini Balmon Jakarta diharapkan dapat terus mempertahanan hasil capaian kinerja meskipun dengan tantangan aduan gangguan yang sangat banyak dan bervariasi yang harus ditangani setiap tahunnya.

4. Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat telekomunikasi	93%	100%

Indikator Kinerja Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi memiliki target realisasi sebesar 93%. Capaian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta pada tahun 2024 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula kegiatan sebagai berikut:

1. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan

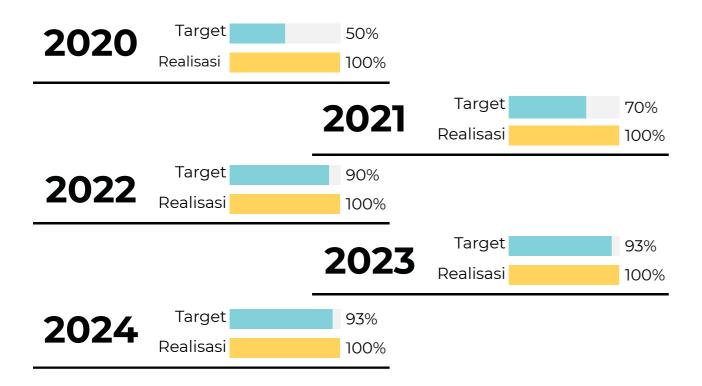
Penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi merupakan tindak lanjut hasil kegiatan pemeriksaan frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan, penanganan gangguan frekuensi radio yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, maupun pemantauan frekuensi radio yang ditemukenali tidak memiliki ISR agar segera memiliki ISR atau menonaktifkankan stasiun pemancarnya. Sedangkan kegiatan penertiban perangkat merupakan tindak lanjut hasil kegiatan monitoring perangkat maupun kegiatan lain yang disertai dengan pemeriksaan sertifikat perangkat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan penertiban frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi adalah untuk mencapai sasaran tertib pengguna frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi secara efektif, efisien sesuai peruntukannya dan tidak saling mengganggu, serta pembinaan hukum kepada pengguna frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang melanggar ketentuan yang berlaku di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta.

2. Sasaran Kegiatan

Berikut sasaran kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi di Balmon Jakarta selama Tahun 2024 dengan target capaian 93% (merujuk ND No. 1083/DJSDPPI.4/PR.04.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Tahun 2024):

- Melaksanakan penertiban frekuensi illegal menjadi off air (nilai maksimal 60%).
- Melaksanakan penertiban perangkat yang ditindaklanjuti dari data perangkat ilegal (nilai maksimal 40%).

3. Capaian Target Tahun 2020-2024 (Penertiban SFR dan APT)



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mampu melaksanakan penertiban frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi pada tahun 2024 sebanyak 54 frekuensi illegal menjadi off air dan 9 perangkat yang teridentifikasi tidak bersertifikat ditindaklanjuti sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mampu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

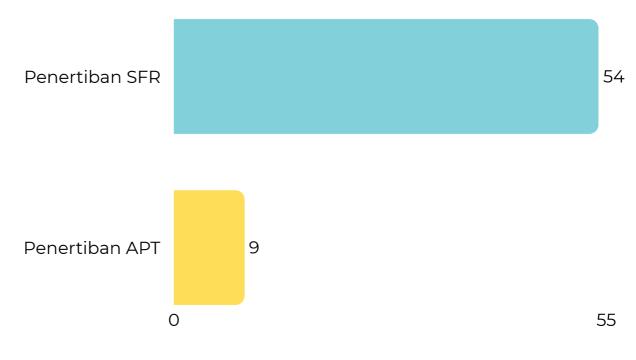
• Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

Kegiatan	Jumlah	Validitas Pelanggaran		
Regiatari	Pelanggaran	Valid	Tidak Valid*	
Montibnas I	8	8	0	
Montibnas II	28	26	2	
Montibnas III	4	4	0	
Montibnas IV	7	7	0	
Kegiatan Rutin	7	5	2	

*pelanggaran yang tidak valid adalah temuan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta yang diklarifikasi ulang kepada pelanggar oleh tim Pengenaan Sanksi Administratif dengan hasil tidak memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif.

• Penertiban Alat/Perangkat Telekomunikasi

Terdapat 9 temuan perangkat tidak bersertifikat pada rentang waktu monitoring/penertiban bulan Januari-Desember dan seluruhnya telah dilakukan penertiban dengan diberikan teguran tertulis.



Capaian Penertiban SFR dan APT Tahun 2024 (sumber: rol.postel.go.id & smart.postel.go.id)











Kegiatan Penertiban SFR dan APT Tahun 2024

4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

A. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan:

 Tingkat kepatuhan para pengguna spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang tinggi terhadap ketentuan peraturan perundangan telekomunikasi sehingga terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, sesuai dengan peruntukannya, dan tidak saling mengganggu.

- Koordinasi yang baik antara pemerintah selaku regulator dengan penyelenggara telekomunikasi dalam pelaksanaan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.
- Pemantauan secara berkala terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang illegal.
- Edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang benar dan aman agar pengguna spektrum frekuensi radio dapat lebih memahami aturan dan ketentuan yang berlaku.
- Penegakan hukum yang tegas dalam pelaksanaan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi dengan memberikan sanksi kepada pelanggar untuk memberikan efek jera dan mengurangi tingkat pelanggaran dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

B. Kendala yang Dihadapi:

- Keterbatasan akses lokasi target operasi yang sulit di jangkau dengan menggunakan mobil monitoring. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menggunakan perangkat handheld/portable.
- Kurangnya sifat kooperatif dari pihak yang menjadi target operasi penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi sehingga menyebabkan kondisi di lapangan menjadi kurang kondusif. Upaya yang telah dilakukan adalah bersikap humanis dan persuasif.
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini adalah jumlah PPNS pada Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta masih relatif sedikit, hal ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari kegiatan penertiban. Upaya yang telah dilakukan adalah telah mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat PPNS.

C. Rekomendasi

Langkah-langkah yang perlu diambil pada tahun 2025 adalah untuk memperkuat dan mengembangkan hasil yang sudah dicapai pada tahun 2024, serta mengoptimalkan efektivitas penertiban SFR dan APT di tahun berikutnya:

 Identifikasi jumlah pelanggaran, lokasi rawan, jenis pelanggaran (izin, teknis, penggunaan APT ilegal). Ambil pembelajaran dari kasus sulit tahun 2024 (misalnya pelanggaran berulang atau pelanggaran oleh instansi tertentu).

- Sesuaikan dengan dinamika terbaru, termasuk alur pelaporan, eskalasi, dan tindakan lapangan. Pastikan aturan internal sejalan dengan regulasi terbaru dari Ditjen Infradigi, Komdigi, dan lembaga teknis lainnya.
- Bekerjasama dengan penyidik PPNS, Polri, dan aparat terkait dalam proses penertiban di lapangan.
- Pendekatan persuasif untuk instansi pemerintah/organisasi yang mungkin belum taat aturan spektrum.
- Ukur efektivitas tindakan, hambatan yang dihadapi, serta perbaikan yang dibutuhkan. Rekomendasi perbaikan kebijakan atau dukungan yang dibutuhkan di tahun mendatang.

5. Tindak Lanjut

- Telah dilakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta secara terus-menerus.
- Meningkatkan koordinasi antara pengguna spektrum frekuensi radio dengan maksud dan tujuan untuk meminimalisir penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang illegal dan/atau tidak sesuai peruntukannya.
- Memberikan edukasi dan kesadaran publik terkait tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi melalui kegiatan sosialisasi.

6. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK



A. Berorientasi pelayanan

Fokus pada memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk melindungi hak-hak pengguna dan mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

B. Akuntabilitas

Penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi dilakukan secara akuntabel berupa pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran dan penegakan hukum yang konsisten, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio.

C. Kompetensi

Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menangani isuisu teknis dan peraturan yang berkaitan dengan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

D. Harmonis

Penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi dilakukan secara harmonis dengan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah berupa koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio, seperti regulator, operator telekomunikasi, dan masyarakat umum.

E. Loyalitas

Setia pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, termasuk integritas dan konsistensi dalam penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio yang adil dan transparan.

F. Adaptif

Adaptif terhadap perubahan dalam industri telekomunikasi dan lingkungan regulasi yang berkaitan berupa kemampuan untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk memastikan penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio yang optimal.

G. Kolaboratif

Bekerjasama dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan aparat penegak hukum yang berwenang untuk mendampingi dalam kegiatan penetiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

7. Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penetiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi, dilakukan beberapa cara berikut:

- Pelatihan dan pengembangan kapasitas personel dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan personel dalam melakukan tugastugas penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, personel dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- Kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti penyelenggara telekomunikasi, regulator, dan lembaga penegak hukum dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penertiban. Kerjasama ini dapat membantu dalam membagi tugastugas penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.
- Sistem pelaporan secara on line yang digunakan dalam kegiatan penetiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi antara yakni Report On Line, APSTARD dan SMART dapat membantu petugas di lapangan dalam melakukan pelaporan secara efisien dan tepat waktu.

Dengan menerapkan beberapa cara di atas, maka efisiensi sisi sumber daya manusia, efisiensi waktu pelaksanaan serta efisiensi pelaporan dalam kegiatan penetiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi dapat tercapai.

8. Benchmarking dengan UPT Lain

Nama UPT	Jumlah SFR Ditertibkan	Jumlah APT Ditertibkan	Capaian
Balmon Jakarta	54	9	100%
Balmon Tagerang	91	79	100%

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Balmon Jakarta memiliki jumlah SFR dan APT yang ditertibkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Balmon Tangerang. Hal ini dapat terjadi karena tingkat kepatuhan pengguna SFR di wilayah Jabodebek lebih tinggi, meskipun dengan jumlah target pemeriksaan SFR baik remote site/open shelter yang lebih banyak. Selain itu, kuantitas hasil monitoring APT yang dilakukan oleh Balmon Tangerang lebih banyak sehingga probabilitas temuan perangkat yang tidak bersertifikat menjadi semakin besar. Dalam hal ini Balmon Jakarta dapat menjadikan capaian kinerja Balmon Tangerang sebagai motivasi untuk perbaikan kinerja penertiban SFR maupun APT menjadi lebih baik.

5. Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di Balmon Jakarta hingga akhir tahun 2024 telah terwujud sesuai target, dengan melaksanakan program kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR secara optimal sehingga target kinerja dapat tercapai.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100%

1. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Kondisi perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur harus terjaga agar fungsi perangkat tetap maksimal guna mendukung tugas dan fungsi utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta yaitu melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

Indikator capaian kinerja tersebut tercermin dengan kesiapsediaan dan berfungsinya perangkat utama dan pendukung SMFR dan alat monitor/ukur yang dimiliki Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, dimana perangkat tersebut harus selalu tersedia saat dibutuhkan dan siap digunakan oleh Pengendali Frekuensi Radio (PFR) dalam segala jenis kegiatan pemantauan dan pengukuran frekuensi radio dengan tingkat keakuratan perangkat yang dapat diandalkan. Hal tersebut dapat terlaksana dengan kegiatan rutin inspeksi pemeliharaan, perbaikan, maupun kalibrasi perangkat SMFR. Adapun dasar kegiatan pemeliharaan perbaikan perangkat SMFR tersebut mengacu pada Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor 838/DJSDPPI/.4/SP.03.01/08/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 tentang SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat SMFR. Perangkat SMFR dibagi menjadi beberapa kelas perangkat, yaitu Stasiun Tetap, Transportable, Mobile dan Portable.

Gambar di bawah ini adalah stasiun monitoring tetap dan stasiun monitoring transportable yang digunakan dalam kegiatan monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio pada wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta.



Stasiun Transportable GSP Lt.24 (Koordinat 06° 10' 45" S 106° 49' 14" E)



Stasiun Transportable GSP Lt.24 (Koordinat 06° 10' 45" S 106° 49' 14" E)



Stasiun Transportable Bogor (Universitas Pakuan Bogor)



Stasiun Slave Maninjau (Koordinat 06° 19' 24" S 106° 49' 14" E)



Stasiun Slave Bambu Llarangan (Koordinat 06° 08' 10" S 106° 42' 47" E)

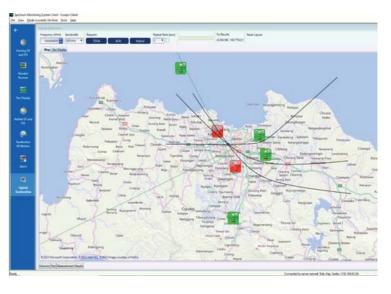


Stasiun Slave Rorotan (Koordinat 06° 09' 18'' S 106° 57' 51'' E)



Stasiun Transportable Bekasi (Hotel Merapi Merbabu Bekasi)

pemeliharaan perbaikan perangkat SMFR tersebut mengacu pada Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor 838/DJSDPPI/.4/SP.03.01/08/20 20 Tanggal 19 Agustus 2020 tentang SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat SMFR. Perangkat SMFR dibagi menjadi beberapa perangkat, yaitu Stasiun Tetap, Transportable, Mobile dan Portable.



Simulasi Fungsi Akurasi Hasil Penunjukan DF secaraHybrid (TDoA +AoA) TCI

Selain memiliki 4 (empat) stasiun monitor tetap dan 3 (tiga) stasiun monitor transportable, Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta juga memiliki 2 (dua) stasiun Mobile Mon/DF yaitu Stasiun Monitor Bergerak V/UHF Mobil SUV-4WD Land



Rover Tipe Defender yang dilengkapi dengan Perangkat Digital Direction Finder Rohde & Schwarz (R&S) Tipe DDF-255, serta beberapa perangkat pendukung pengukuran portable lainnya.



Stasiun Bergerak Mon/DF R&S DDF-255 (Mobil Land Rover Defender 110SW)

1 (satu) unit stasiun mobile lainnya berupa 1 (satu) unit mobil monitoring SUV Merk Isuzu tipe MUX dengan instalasi perangkat Mon/DF pabrikan Rohde & Schwarz (R&S) dengan Type ESMD.





Stasiun Bergerak Mon/DF R&S ESMD (Mobil SUV Merk Isuzu tipe MUX)

2. Sasaran Kegiatan

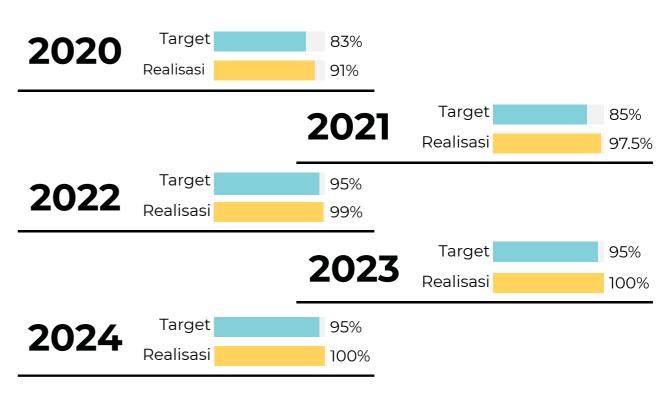
Sasaran kegiatan dalam rangka menjaga operasional dan fungsi monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT ditujukan untuk memastikan fungsi dan kegunaan perangkat SMFR agar dapat digunakan setiap saat, disamping memastikan perangkat agar dapat selalu berfungsi optimal melalui pelaksanaan pemeliharaan secara rutin berupa inspeksi dan uji fungsi perangkat SMFR, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta juga mengupayakan kegiatan pemeliharaan berupa perbaikan secara mandiri jika ditemukenali terdapat kerusakan pada perangkat atau modul yang dinilai masih dapat ditangani atau diperbaiki oleh tim pemeliharaan SMFR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemeliharaan. Mengingat kerap terjadi kerusakan perangkat serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan, maka idealnya diperlukan dukungan anggaran pemeliharaan perangkat yang sesuai bagi Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital maupun UPT sebagai penanggung jawab operasional perangkat pendukung SMFR.

3. Capaian Target

Indikator Kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 95 %. Hal tersebut mendorong Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakartav agar dapat merealisasikan target tersebut hingga dapat mencapai total akumulasi capaian sebesar 100% dengan kalkulasi persentase capaian tahun 2024 sebesar 105,26%. Selanjutnya dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 306.372.000,- (100%) telah direalisasikan sebanyak Rp. 298.436.500,- (97,41%) untuk kegiatan inspeksi rutin dan pemeliharaan perangkat SMFR.

Pada aplikasi SMFR terdaftar jumlah rincian daftar perangkat utama dan pendukung maupun alat ukur SMFR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta untuk periode tahun 2024 sebanyak 45 perangkat utama dan 154 perangkat pendukung dengan persentase kesiapan harian total hingga mencapai 100%...

Berikut hasil capaian periode lima tahun terakhir:



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mampu untuk meningkatkan dan tetap mempertahankan capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan kegiatan yang terlaksana dilakukan dengan tepat dan efektif dalam menjaga operasional dan fungsi perangkat monitoring frekuensi radio.

Kondisi SMFR Stasiun Mon/DF Tetap dan Transportable di akhir tahun 2024

No	Stasiun Monitor / DF	Kondisi Saat Ini	Tahun Perolehan	Keterangan
1	Stasiun Mon/DF Tetap TCI 735 Maninjau (Jakarta Selatan)	Rusak	2013	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem AoA (Kerusakan Modul Antenna)
2	Stasiun Mon/DF Tetap TCI 739 Rorotan (Jakarta Utara)	Baik	2021	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem Hybrid (AoA &TDoA)
3	Stasiun Mon Transportable TCI 709 Bogor	Baik	2021	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem TDoA
4	Stasiun Mon Transportable TCI 709 Bekasi	Baik	2021	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem TDoA
5	Stasiun Mon Transportable TCI 709 Kepulauan Seribu	Baik	2021	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem TDoA
6	Stasiun Mon Transportable TCI 709 Lt. 24 GSP (Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat)	Baik	2024	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem TDoA
7	Stasiun Mon/DF Tetap TCI 739 Bambularangan (Jakarta Barat)	Baik	2024	Fungsi Monitor dan Pencarian Arah sistem Hybrid (AoA &TDoA)

Salah satu upaya untuk menjaga fungsi perangkat/alat ukur tetap akurat adalah dengan melakukan kalibrasi rutin terhadap perangkat/alat ukur yang dimiliki. Untuk tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah mendaftarkan kalibrasi perangkat TV Analyzer yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

Dengan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, maka kegiatan monitoring frekuensi radio menggunakan stasiun tetap/transportable dalam rangka monitoring band frekuensi Low Frequency (LF), Medium Frequency (MF), High Frequency (HF), Very High Frequency (VHF), dan Ultra High Frequency (UHF) dapat terlaksana dengan baik.

4. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Indikator kinerja "Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT" dapat tercapai karena beberapa hal berikut:

- Adanya aplikasi SMFR (smfr.postel.go.id) yang disediakan oleh Direktorat Pengendalian Infradigi yang memudahkan dalam melakukan pelaporan secara online dan melakukan perhitungan capaian PK secara otomatis.
- Adanya aplikasi SMSN (smsn.postel.go.id) yang disediakan oleh Direktorat Pengendalian Infradigi yang memudahkan dalam memantau fungsi perangkat secara real-time.
- Sinergi dan kerjasama yang baik antar anggota tim kerja sehingga seluruh kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR dapat dilakukan sesuai dengan SOP dengan hasil yang memuaskan.
- Dengan adanya renovasi gedung pada stasiun monitor Bambularangan dan Rorotan, dan pergantian perangkat TCI pada Stasiun GSP, perangkat SMFR perlu dilakukan dismantle selama masa renovasi dan kemudian instalasi ulang setelah pekerjaan renovasi selesai.

5. Tindak Lanjut

Dengan melakukan kegiatan inspeksi perangkat SMFR secara rutin, kondisi dan kinerja perangkat SMFR dapat tercatat secara berkala dalam dokumentasi dan pelaporan kegiatan. Sehingga dapat dilakukan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan atau malfungsi perangkat yang menyebabkan terganggunya operasional dan kegiatan monitoring frekuensi radio.

Untuk selanjutnya rangkaian kegiatan tersebut akan diupayakan agar lebih efektif dan efisien, dengan target capaian kegiatan inspeksi pemeliharaan perangkat SMFR yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dapat dipertahankan dan dilaksanakan dengan hasil yang lebih optimal dan memuaskan.

6. Implementasi budaya nilai



Dalam menunjang target "Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT", Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

A. Berorientasi pelayanan

- Petugas pemeliharaan berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna pengguna spektrum frekuensi radio agar pemanfaatan spektrum tidak terganggu dengan menjaga operasional dan fungsi stasiun monitor agar dapat dimanfaatkan penuh oleh pengendali frekuensi radio dalam melaksanakan kegiatan monitoring, penanganan gangguan maupun pengukuran parameter teknis frekuensi radio guna ketertiban penggunaan, memastikan perangkat SMFR berfungsi dengan baik dan akurat untuk pemanfaatan kapanpun dan dimanapun.
- Selalu melakukan analisa evaluasi terhadap karakteristik dan akurasi perangkat serta pemeliharaan dan perbaikan perangkat agar lebih optimal.

B. Akuntabilitas

- Petugas pemeliharaan melaksanakan tugas inspeksi pemeliharaan dan perbaikan perangkat dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
- Petugas pemeliharaan memiliki komitmen tanggung jawab, integritas, kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas;
- Petugas pemeliharaan memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam memanfaatkan, menjaga dan memelihara perangkat yang merupakan barang milik negara dalam segala tugas kegiatan secara baik;

C. Kompeten

- Petugas pemeliharaan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam segala hal yang diperlukan disamping berusaha mengembangkan ilmu dan pengalaman untuk meningkatkan kompetensi terkait tugas dan fungsi.
- Ketika melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR, petugas pemeliharaan selalu melakukan sharing knowledge antar sesama petugas untuk meningkatkan kompetensi teknis yang dimiliki.

D. Harmonis

- Petugas pemeliharaan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam tugas pemeliharaan perangkat dan bekerjasama dengan rekanan lain yang ada di lingkungan Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta.
- Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu kepada sesama, pengetahuan dan pengalaman antar setiap petugas pemeliharaan.

E. Loyal

 Taat dan tertib dalam menjalankan setiap proses kegiatan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan yang ditetapkan dan secara rutin tanggap melaporkan segala anomali yang terjadi maupun hasil kegiatan pemeliharaan kepada pimpinan.

F. Adaptif

- Petugas pemeliharaan tanggap dan mampu beradaptasi dengan perubahan sistem monitoring dan pelaporan secara digital melalui aplikasi berbasis web;
- Petugas pemeliharaan mengikuti workshop pemeliharaan perangkat untuk dapat berdaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

G. Kolaboratif

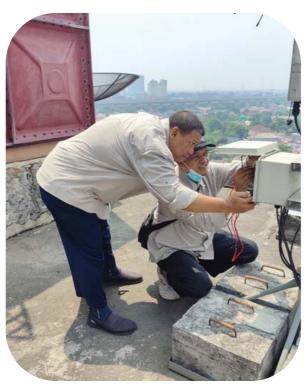
- Menerapkan koordinasi yang baik dan bekerjasama efektif dengan Tim Kerja lainnya di lingkup lingkungan kerja Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta seperti Bagian Umum, Tim Kerja Monitoring dan Tim Kerja Penertiban untuk memastikan fungsi infrastruktur perangkat SMFR berada dalam kondisi optimal.
- ·Menerapkan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam setiap kegiatan pemeliharaan SMFR maupun dalam setiap kegiatan pemeriksaan setiap anomali yang terjadi pada perangkat SMFR.
- ·Membuka diri dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan troubleshooting ketika terjadi kerusakan perangkat yang tidak dapat diperbaiki secara mandiri oleh petugas.

7. Efisiensi

Kegiatan inspeksi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat dapat langsung dilaporkan secara online melalui aplikasi SMFR, dengan demikian tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan lebih efisien.







Kegiatan Inspeksi dan Pemeliharaan Perangkat SMFR Stasiun Tetap dan Transportable

8. Benchmarking capaian dengan UPT lain

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tahun 2024 memiliki 9 (sembilan) stasiun monitor yang terdiri dari Stasiun Tetap (Fix), Stasiun *Transportable*, dan Stasiun Bergerak / *mobile*. Berikut adalah perbandingan jumlah stasiun monitor yang dimiliki Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dengan UPT lainnya:

Nama UPT		Jumlah Stas	iun Monitor	Luas Wilayah	Capaian	
Nama OF 1	Fix	Transportable	Portable	Mobile	(km2)	Capalali
Balmon Jakarta	3	4	9	2	4.934,43	100%
Balmon Tangerang	6	2	18	2	9.160,70	100%

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Balmon Jakarta memiliki jumlah stasiun monitor yang lebih sedikit dibandingkan dengan Balmon Tangerang, hal ini wajar karena Balmon Tangerang memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan Balmon Jakarta.

Namun secara kinerja baik Balmon Jakarta dan Balmon Tangerang samasama dapat mencapai target kinerja 100%. Dalam hal ini Balmon Jakarta dapat menjadikan capaian Balmon Tangerang sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi dan kompetensi teknis petugas pemeliharaan perangkat SMFR agar dapat menjaga operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitoring frekuensi radio di UPT.

Dengan demikian, kolaborasi yang sinergis antara kedua Balmon ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap spektrum frekuensi di wilayah masing-masing, sehingga tercipta lingkungan komunikasi yang lebih tertib dan aman. Penting kiranya bagi kedua Balmon untuk terus saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mengadakan pelatihan bersama guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Dengan begitu, tantangan-tantangan yang mungkin muncul di masa depan dapat diatasi dengan lebih efektif dan terukur. Keberhasilan ini juga dapat menjadi inspirasi bagi Balmon lain di seluruh Indonesia untuk mencapai kinerja yang sama, demi kemajuan bersama dalam pengelolaan frekuensi radio yang lebih baik.

Namun secara kinerja baik Balmon Jakarta dan Balmon Tangerang samasama dapat mencapai target kinerja 100%. Dalam hal ini Balmon Jakarta dapat menjadikan capaian Balmon Tangerang sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi dan kompetensi teknis petugas pemeliharaan perangkat SMFR agar dapat menjaga operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitoring frekuensi radio di UPT.

6. Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT

Berfungsinya perangkat pendukung SMFRdan alat monitoring /ukur di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta hingga akhir tahun 2024 telah terwujud sesuai target karena Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah melaksanakan program kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR dengan optimal sehingga target kinerja dapat tercapai.

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT	100%	100%

1. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait permohonan Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP), dengan berpedoman pada ketentuan baru Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, bahwa proses perizinan Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dilaksanakan dengan memakai sistem daring (online) sebagai upaya dalammemberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih cepat, efektif, efisien dan transparan khususnya parapegiat Radio Amatir. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta juga melaksanakan penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sebagai persyaratan untuk penerbitan IAR yang dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk semua tingkatan (Siaga, Penggalang dan Penegak).

2. Sasaran Kegiatan

Tertib perizinan penggunaan frekuensi radio Amatir dan meningkatkan situasi kondusif dalam penggunaan frekuensi radio perorangan khususnya Amatir Radio.

3. Capaian Target

Tertib perizinan penggunaan frekuensi radio Amatir dan meningkatkan situasi kondusif dalam penggunaan frekuensi radio perorangan khususnya Amatir Radio.

Indikator Kinerja Persentase (%) Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 100% atau 100 peserta ujian. Sementara capaian untuk tahun 2024 sebanyak 590 peserta atau 590% atau sama dengan 100% dari target.

Pada Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi penyelengaraan UNAR oleh Balmon Jakarta sesuai target yang direncanakan. Penyelenggaraan UNAR dilaksanakan dalam kategori UNAR Reguler dan UNAR Non Reguler. Kegiatan UNAR Reguler dilaksanakan di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dengan sistem CAT sebanyak 1 kali kegiatan setiap bulan atau 12 kali kegiatan dalam satu tahun. Selanjutnya untuk kegiatan UNAR Non Reguler sesuai ketersediaan anggaran dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Mei 2024 dengan lokasi ujian bertempat di SMA ASISI Jakarta Jl. K.H. Ramli Sel. No.24 5, RT.4/RW.3, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870.
- Pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan lokasi ujian bertempat di SMK Negeri 61 Kepulauan Seribu Pulau Tidung.
- Pada tanggal 23 November 2024 dengan lokasi ujian bertempat di Hotel Bumi Wiyata Jl. Margonda No.281, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16423.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika maka terhitung sejak tanggal 18 November 2023 tarif PNBP untuk REOR, IAR, dan IKRAP dihilangkan atau berlaku Rp 0,- (nol rupiah).

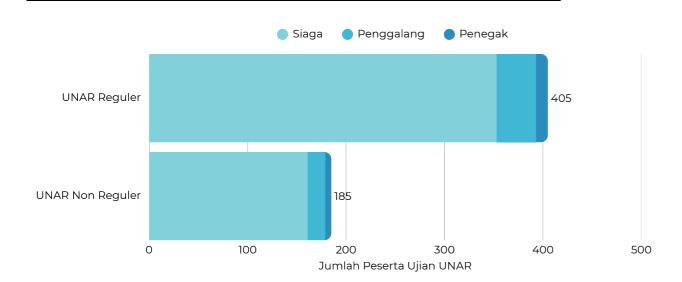
Berikut rekapitulasi data penyelenggaraan UNAR pada Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta Tahun 2024:

UNAR Reguler

Target : 12 kali dalam satu tahun Realisasi: 12 kali dalam satu tahun

Reguler

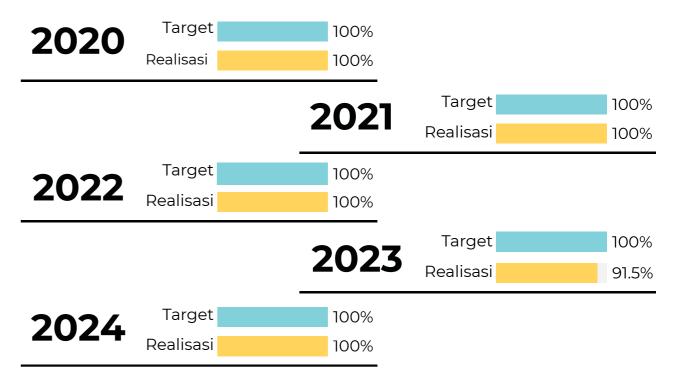
UNAR Non Target : 2 kali dalam satu tahun Realisasi: 3 kali dalam satu tahun



UNAR meningkatkan jumlah pegiat amatir radio yang memiliki IAR sesuai kecakapan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan penggunaan frekuensi radio yang tertib. Selain itu, UNAR juga meningkatkan sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai regulator dengan ORARI sebagai organisasi yang menaungi amatir radio di Indonesia. Dengan adanya peningkatan jumlah pegiat amatir radio yang terlatih dan berlisensi, diharapkan juga dapat mendorong inovasi dan kolaborasi dalam berbagai proyek komunikasi di tingkat nasional maupun internasional. Para amatir radio ini dapat berperan penting dalam situasi darurat, membantu komunikasi di daerah terpencil, dan bahkan berkontribusi dalam penelitian ilmiah terkait atmosfer dan propagasi gelombang radio.

Sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan ORARI juga membuka peluang untuk program pelatihan dan workshop yang dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan para anggota. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi radio di Indonesia, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan persahabatan di antara para penggemar radio dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, amatir radio tidak hanya menjadi hobi, tetapi juga wadah untuk pengembangan diri dan kontribusi sosial yang lebih luas.

Berikut adalah data capaian kinerja dalam periode 5 tahun terakhir:



Pada Tahun 2023, jumlah peserta UNAR hanya mencapai 91,5% dari target (340 peserta), disebabkan oleh menurunnya minat terhadap amatir radio. Tren penurunan ini berdampak signifikan, mengingat pada Tahun 2020 hingga 2022, jumlah peserta UNAR berkisar antara 693 hingga 771 orang per tahun. Namun, berkat komitmen Balmon Jakarta dalam meningkatkan kualitas layanan dan kolaborasi aktif dengan ORARI, capaian kinerja berhasil ditingkatkan pada Tahun 2024 hingga melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran UNAR Reguler maupun Non Reguler pada Tahun 2024 telah dilakukan secara tepat dan efektif.

Peningkatan ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan, dukungan dari komunitas amatir radio yang lebih berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan UNAR juga berkontribusi pada pencapaian ini. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang solid, tantangan yang dihadapi dapat diatasi. Dengan keberhasilan ini, diharapkan minat terhadap amatir radio akan terus berkembang, dan Balmon Jakarta berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan demi kemajuan dunia amatir radio di Indonesia.

4. Inovasi /Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

Penyelenggaraan UNAR berbasis CAT tahun 2024 di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah terealisasi dan mencapai target yang direncanakan karena didukung oleh beberapa hal berikut:

- Meningkatkan koordinasi dengan ORARI lokal dan daerah untuk UNAR.
- Mengarahkan peserta untuk belajar melalui aplikasi SeeNow sebelum ujian.
- Menyediakan layanan konsultasi daring via Whatsapp untuk informasi dan perizinan.
- Membantu pendaftaran peserta UNAR.
- Menambah kegiatan UNAR Non Reguler dari 2 menjadi 3 kali sesuai permintaan ORARI Daerah Jakarta.

5. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator tersebut

Mengarahkan peserta ujian UNAR yang lulus untuk segera berkoordinasi dengan organisasi amatir lokal sesuai dengan identitas alamat KTP terkait pendaftaran keanggotaan IAR yang telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Mengarahkan peserta yang tidak lulus untuk lebih giat mempelajari materi ujian amatir radio melalui aplikasi SeeNow dan berkoordinasi dengan pengurus ORARI lokal untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut.

6. Implementasi budaya nilai BerAKH



Dalam penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio ini, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

A. Berorientasi pelayanan

- Berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat yang mengikuti mengikuti proses perizinan Amatir Radio dengan mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).
- Melaksanakan koordinasi dengan organisasi terkait (ORARI dan RAPI) dalam rangka pembinaan dan kerjasama mewujudkan tertib perizinan dan penggunaan frekuensi amatir radio sesuai peraturan.
- Melakukan evaluasi terkait penyelengaraan UNAR sebagai upaya melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

B. Akuntabilitas

- Pengawas ujian melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai pengawas untuk kepentingan pribadi.

C. Kompeten

- Pengawas ujian harus meningkatkan kompetensi diri untuk dapat mengantisipasi tindak kecurangan oleh peserta.
- Tiap pegawai saling berbagi pengetahuan tentang tata cara penyelenggaraan UNAR berbasis CAT.

D. Harmonis

- Menghargai setiap peserta apapun latar belakangnya, karena peserta Ujian Negara Amatir berasal dari beragam profesi, usia dan pendidikan yang telah ditempuh.
- Kerjasama dan kekompakan panitia pelaksana UNAR selama kegiatan berlangsung.

E. Loyal

- Sebagai penyelenggaran UNAR selalu berusaha untuk menjaga nama baik Instansi dan Negara.
- Memegang teguh Pakta integritas dalam penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio.

F. Adaptif

- Perubahan pelayanan terkait alur perpanjangan Izin Amatir Radio harus cepat dipahami oleh petugas pelayanan.
- Penyelenggara UNAR selalu mengarahkan calon peserta untuk mempersiapakan diri dengan melakukan TryOut mandiri menggunakan aplikasi SeeNow

G. Kolaboratif

• Membangun hubungan kerja yang sinergis dengan orari lokal dengan harapan mendapatkan hasil yang terbaik.

7. Efisiensi

Dengan penyelenggaraan UNAR reguler berbasis CAT yang dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang aula, koneksi internet, dan perangkat laptop milik kantor Balmon Jakarta, telah menghemat biaya sewa sarana dan prasarana.







8. Benchmarking capaian dengan UPT lain

Sepanjang Tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta menyelenggarakan UNAR Reguler sebanyak 12 kali dalam setahun atau satu kali setiap bulannya dan UNAR Non Reguler sebanyak 3 kali dalam setahun. Berikut adalah perbandingan penyelenggaraan UNAR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dengan UPT Monitor lainnya:

Name UDT	Jumlah Peserta UNAR				Canaian Kinasia
Nama UPT	Siaga	Penggalang	Penegak	Total	Capaian Kinerja
Balmon Jakarta	514	58	18	590	100%
Balmon Bandung	487	163	67	717	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memiliki jumlah peserta UNAR yang lebih sedikit dibandingkan dengan Balmon Bandung meskipun telah menyelenggarakan UNAR Non Reguler lebih banyak (3 kali pelaksanaan) dibandingkan dengan Balmon Bandung yang hanya 1 (satu) kali. Dalam hal ini Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dapat menjadikan capaian Balmon Bandung sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat agar dapat melakukan perbaikan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan UNAR selanjutnya.

7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%

1. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Program kegiatan pelayanan penanganan Tagihan dan Pencegahan Piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio adalah dalam rangka mencegah keterlambatan pembayaran oleh Wajib Bayar/ Penanggung Hutang dan untuk mencegah/ meminimalisir adanya Piutang Negara dari PNBP atas tagihan BHP frekuensi radio. Untuk kegiatan penanganan Tagihan BHP frekuensi radio dilaksanakan dengan melakukan

monitor status pembayaran melalui aplikasi Billing-ISR yang kemudian dilanjutkan dengan menghubungi dan mengunjungi Wajib Bayar ke lokasi alamat terdaftar untuk melakukan klarifikasi langsung terkait kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio yang belum diselesaikan/ dilunasi sehingga melewati batas jatuh tempo pembayaran serta untuk memastikan kesesuaian data dilapangan dengan database SIMS wilayah kerja Balmon Jakarta.

Kegiatan penanganan Piutang BHP frekuensi radio dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bahwa Piutang Negara dengan kategori macet pada Kementerian Negara/Lembaga dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) per penanggung Hutang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan maka tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Menindaklanjuti ketentuan peraturan baru tersebut di atas, kegiatan ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan penanganan Piutang BHP frekuensi radio di atas nilai 8 (Delapan) juta rupiah dan di bawah nilai 8 (Delapan) juta rupiah. Pelayanan penanganan Piutang yang dilimpahkan pengurusannya kepada PUPN dilaksanakan dengan kegiatan pendampingan KPKNL untuk penanganan pelimpahan Piutang yang sudah pada tahap penyampaian Surat Paksa kepada Penanggung Hutang langsung ke lokasi alamat yang terdaftar untuk penyelesaian kewajiban pembayaran.

2. Sasaran Kegiatan

- Melaksanakan kunjungan ke lokasi alamat dan keberadaan Penanggung Hutang/Wajib Bayar BHP Frekuensi Radio sesuai data perizinan di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta untuk melakukan klarifikasi pembayaran atas Tunggakan Tagihan BHP Frekuensi Radio sebelum jatuh tempo pembayaran yang sudah ditentukan.
- Melaksanakan koordinasi dan pendampingan KPKNL untuk penyampaian Surat Paksa atas tagihan tunggakan pembayaran BHP Frekuensi Radio yang sudah dilimpahkan ke KPKNL di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta.
- Pelunasan/pembayaran atas tagihan Piutang Negara dari PNBP BHP Frekuensi Radio yang disampaikan melalui Surat Paksa dari KPKNL oleh Penanggung Hutang/Wajib Bayar di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta.
- Melakukan distribusi SPP BHP Frekuensi Radio kepada para Wajib Bayar BHP Frekuensi Radio yang dikirimkan melalui email yang terdaftar.

3. Capaian Target

Kegiatan penanganan Tagihan BHP Frekuensi Radio telah terealisasi 100% sesuai target penanganan piutang yaitu sebanyak 12 (dua belas) pelaporan dalam satu tahun atau satu laporan perbulan yang disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan UPT (SIPUT).

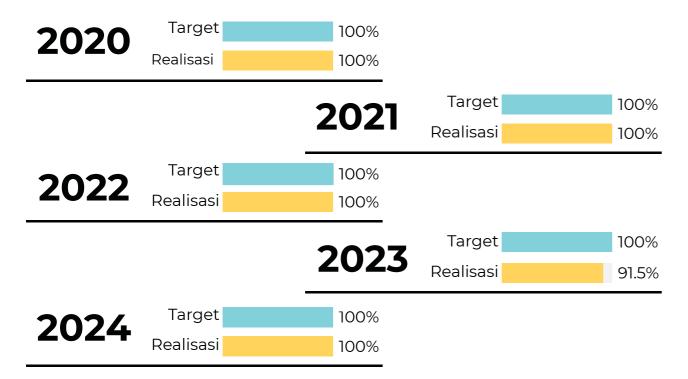
Selanjutnya dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 269.000.000,-(100%) telah direalisasikan sebanyak Rp. 268.981.700,- (99,99%) melalui kegiatan klarifikasi pencegahan piutang dan kegiatan penanganan piutang. Kegiatan klarifikasi lebih difokuskan dalam hal pencegahan terjadinya piutang dari denda keterlambatan pembayaran dengan status tagihan Annual, Renewal, dan Reminder 1 s.d 6 (Sebelum ISR dicabut otomatis secara sistem). Sementara Kegiatan Penanganan Piutang difokuskan dalam hal menangani Wajib Bayar/Penanggung Utang yang telah dikenakan denda keterlambatan pembayaran dengan status tagihan Reminder 1 s.d 24. Berikut adalah rekapitulasi hasil dari kegiatan tersebut:

lonis Kogiatan	Jumlah	Jumlah Invoice	Total Tagihan	
Jenis Kegiatan	Kegiatan	Tersampaikan	Terbayar	Belum Terbayar
Klarifikasi dan Pencegahan Piutang	20	346	Rp790.579.447	Rp249.923.060
Penanganan Piutang	9	97	Rp199.618.206	Rp 66.442.733
TOTAL	29	443	Rp990.197.653	Rp316.365.793

Tagihan BHP yang belum diselesaikan pembayarannya masih terus dimonitor dan diklarifikasikan kembali kepada para Wajib Bayar untuk segera diselesaikan.

Sementara terkait pelimpahan piutang negara, sampai dengan akhir Tahun 2024 jumlah outstanding Piutang atas PNBP BHP Frekuensi Radio yang masih harus ditindaklanjuti oleh KPKNL Jakarta V sebanyak Rp 300.668.638.159,-KPKNL Bogor sebanyak Rp 35.773.758,- dan KPKNL Bekasi sebanyak Rp5.880.290,- seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Berikut adalah capaian kinerja periode 5 tahun terakhir:



Dengan mengedepankan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mampu untuk selalu mempertahankan capaian kinerja hingga dapat selalu mencapai target kinerja yang sudah direncanakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan kegiatan yang terlaksana dilakukan dengan tepat dan efektif dalam melakukan penanganan dan pencegahan piutang negara BHP Frekuensi Radio.

Keberhasilan ini tidak hanya berdampak positif bagi institusi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Melalui pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang efisien, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memastikan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Inovasi /Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

- Melakukan monitor status tagihan pembayaran BHP melalui Aplikasi Billing-ISR (https://billing-isr.kominfo.go.id), dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- Menghubungi klien melalui nomor telepon dan/atau email yang terdaftar khususnya untuk tagihan pembayaran BHP yang sudah mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran.
- Melakukan kunjungan dan klarifikasi terhadap wajib bayar ke lokasi alamat terdaftar khususnya untuk status tagihan keterlambatan.
- Membantu klien yang mengalami kendala dalam akun MySpectra untuk mengunduh tagihan pembayaran (invoice) maupun cara menggunakan fitur menu aplikasi secara langsung pada saat kegiatan di lokasi alamat.
- Mengarahkan klien untuk menghubungi loket pelayanan terpadu Ditjen Infradigi melalui telpon atau surat terkait perubahan data akun.

5. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator tersebut

Melakukan evaluasi dari seluruh kegiatan penanganan tagihan dan pencegahan piutang BHP Frekuensi Radio untuk terus melakukan perbaikan pada kegiatan selanjutnya terutama dengan lebih mengoptimalkan distribusi SPP BHP Frekuensi Radio melalui email kepada para Wajib Bayar/Penanggung Piutang.

6. Implementasi budaya nilai



Dalam penyelenggaraan kegiatan Penanganan Tagihan dan Pencegahan Piutang Biaya Hak (BHP) kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

A. Berorientasi pelayanan

- Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat pengguna Frekuensi Radio.
- Memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan mengunduh invoice karena masih terkendala dalam mengakses Aplikasi Billing-ISR.
- Memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pemohon izin.
- Melakukan evaluasi kegiatan Penanganan Tagihan dan Pencegahan Piutang Biaya Hak (BHP) untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

B. Akuntabel

- Petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik negara untuk kegiatan pelayanan dengan secara baik, efektif dan efisien;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

C. Kompeten

- Petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/ kemampuan diri dalam segala hal yang diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi;
- Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.

D. Harmonis

 Petugas pelayanan mampu melayani pemohon izin dengan ramah dan tenang dalam menyampaikan penjelasan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami tanpa membedakan latar belakang yang dimiliki pemohon izin.

E. Loyal

 Taat dan tertib dalam menjalankan setiap proses perizinan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang ditetapkan dan secara rutin melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.

F. Adaptif

- Petugas pelayanan tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait peraturan dan alur proses perizinan yang terjadi sewaktu – waktu;
- Berkontribusi dalam perbaikan pelayanan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi dalam peraturan maupun proses perizinan kepada masyarakat dengan cepat dan mudah dipahami.

G. Kolaboratif

• Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak/instansi terkait untuk mendorong kesadaran wajib bayar untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sebelum jatuh tempo pembayaran.

7. Efisiensi

Implementasi pelayanan perizinan secara online khususnya terkait pendistribusian rincian tagihan tidak lagi dikirimkan melalui jasa pengiriman sehingga menghemat biaya anggaran pengiriman surat SPP BHP Frekuensi Radio.







8. Benchmarking capaian dengan UPT lain

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja dengan UPT lainnya:

Nama UPT	Target Capaian	Capaian Kinerja	Jumlah Kab/Kota
Balmon Jakarta	100%	100%	11 Kab/Kota
Balmon Surabaya	100%	100%	38 Kab/Kota
Balmon Medan	100%	100%	33 Kab/Kota

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memiliki jumlah wilayah kabupaten/kota yang lebih sedikit dibandingkan dengan Balmon Surabaya dan Balmon Medan. Meskipun sama-sama dapat mencapai target kinerja yang sudah direncanakan, perbedaan jumlah kabupaten/kota wilayah layanan ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Balmon Surabaya dan Balmon Medan dalam proses penanganan piutang BHP Frekuensi Radio dan koordinasi dengan KPKNL setempat. Hal ini dapat dijadikan motivasi bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Dengan jumlah wilayah yang lebih sedikit, Balmon Jakarta memiliki keunggulan dalam hal fokus dan pengawasan yang lebih terarah. Mereka dapat lebih mudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan perhatian yang memadai. Namun, ini juga berarti bahwa Balmon Jakarta harus lebih inovatif dan efisien dalam strateginya untuk tetap bersaing dan menjaga kinerja yang optimal.

Sebagai bentuk motivasi, Balmon Jakarta dapat mengadopsi praktik terbaik dari Balmon Surabaya dan Medan yang telah terbukti efektif dalam mengelola wilayah yang lebih luas. Dengan demikian, mereka dapat memperbaiki proses internal dan meningkatkan efektivitas kerja, sehingga tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampauinya. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga membangun reputasi Balmon Jakarta sebagai institusi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada.

8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%

1. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebagai UPT Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Ditjen Infradigi) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio berupa pelayanan perizinan berbasis web (e-Licensing), penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), pelayanan penanganan gangguan frekuensi radio, penertiban pelanggaran atas penggunaan spektrum frekuensi radio, dan kegiatan sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam upaya terus membangun dan meningkatkan

kepatuhan dan ketertiban penggunaan frekuensi radio oleh masyarakat, sehingga perlu untuk memperluas sosialisasi pengetahuan dan pemahaman terkait perizinan dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Pada tahun anggaran 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah melaksanakan program Sosialisasi Frekuensi Radio kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) kali sesuai target dan jadwal yang direncanakan dan juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

2. Sasaran Kegiatan

Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengetahuan terkait peraturan terbaru khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Memberikan sosialisasi terkait tata cara/alur proses perizinan penggunaan frekuensi radio, prinsip penggunaan dan pemanfaatan frekuensi radio yang baik dan benar serta mengenal dan memahami tugas fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio.

Kemudian dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta untuk mengukur tingkat kepuasan berdasarkan 4 indeks kriteria yaitu Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Puublik (IPKP), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Hasil dari survei dapat juga digunakan untuk melakukan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan masukan dan saran dari para responden survei.

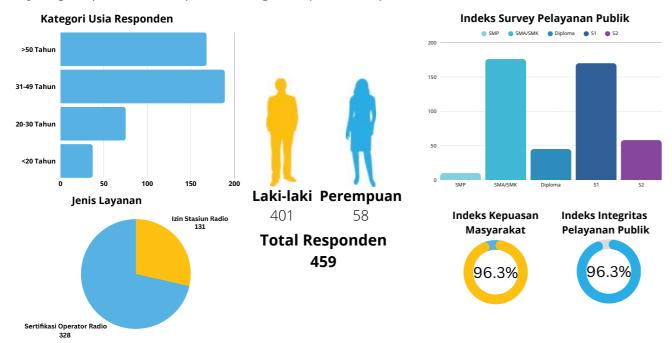
3. Capaian Target

Pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia untuk kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio Kepada Masyarakat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

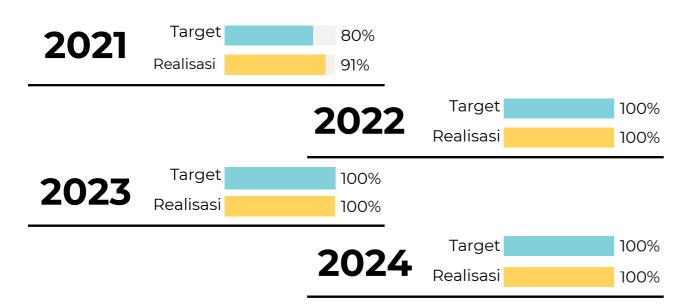
Bab III Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Persentase terlaksananya kegiatan sosialisasi Pelayanan Publik target 100%, capaian target 100% dan realisasi kegiatan 100%. Pagu kegiatan Sosialisasi sebesar Rp. 102.545.000.- dan realisasi anggaran kegiatan Rp.102.283.540,- (99,75%).

Sementara Indikator Survei Kepuasan Masyarakat sudah terlaksana dengan capaian target 100% yang diikuti oleh 459 responden dan capaian IIPP/IKM 3.85 (Sangat Baik) dan IPAK/IPKP 3.85 (Sangat Baik) dengan detail hasil seperti yang dapat terlihat pada infografis profil responden berikut:



Berikut capaian kinerja dalam periode 4 tahun terakhir:



Dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Balmon Jakarta berhasil mempertahankan kinerja dan mencapai target yang direncanakan. Ini menunjukkan bahwa anggaran dan kegiatan dilaksanakan secara tepat dan efektif dalam sosialisasi frekuensi radio kepada masyarakat.

4. Inovasi /Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

- Merencanakan kegiatan dengan berdasarkan tema kegiatan dengan konsep penyusunan yang baik;
- Menyiapkan narasumber terkait sesuai dengan tema kegiatan;
- Menentukan target peserta undangan kegiatan sosialisasi sesuai dengan tema kegiatan;
- Menyusun tim kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan tugas dalam kegiatan;
- Menyiapkan sarana dan prasarana pada kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan;

5. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator tersebut

- Melaksanakan pelayanan perizinan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Penanganan terhadap pengaduan gangguan frekuensi radio sesegera mungkin dan secara tuntas
- Pelaksanaan penertiban terhadap frekuensi illegal serta proses penindakan hukum untuk pelanggaran penggunaan frekuensi
- Pelaksanaan sosialisasi tentang frekuensi radio kepada masyarakat luas lewat media social maupun pertemuan langsung agar dapat terlaksana secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait peraturan penggunaan frekuensi radio dan sanksi denda administratif bagi pelanggar aturan tersebut.
- Melakukan evaluasi secara berkala terkait penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang sudah terlaksana agar dapat terus melakukan inovasi dan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

6. Implementasi budaya nilai



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio kepada Masyarakat, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut :

A. Berorientasi pelayanan

- Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat pengguna Frekuensi Radio.
- Memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan mengunduh invoice karena masih terkendala dalam mengakses Aplikasi Billing-ISR.
- Memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pemohon izin.
- Melakukan evaluasi kegiatan Penanganan Tagihan dan Pencegahan Piutang Biaya Hak (BHP) untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

B. Akuntabel

- Petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik negara untuk kegiatan pelayanan dengan secara baik, efektif dan efisien;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

C. Kompeten

- Petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/ kemampuan diri dalam segala hal yang diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi;
- Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.

D. Harmonis

• Narasumber mampu memberikan materi, menjelaskan, dan berinteraksi dengan peserta dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan peserta.

E. Loyal

 Taat dan tertib dalam menjalankan kegiatan Sosialisasi sesuai dengan susunan acara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

F. Adaptif

- Panitia tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait kegiatan yang dapat terjadi sewaktu waktu;
- Berkontribusi dalam kegiatan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi kepada masyarakat dengan namun mudah dipahami.

G. Kolaboratif

• Panitia berkoordinasi dan bekerjasama dengan narasumber dan pihak terkait untuk mensukseskan kegiatan Sosialisasi.

Dalam upaya pencapaian kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, telah dilakukan Survei Pembangunan ZI yang dimulai dari bulan Januari 2024. Survei Pembangunan ZI ini ditujukan pada penilaian hasil kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan birokrasi pelayanan dari unit kerja yang dinilai secara langsung oleh masyarakat sebagai pihak penerima manfaat pelayanan.

Hasil Survei ini disampaikan secara terbuka sebagai informasi hasil kualitas pelayanan publik dan perilaku anti korupsi di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebagai UPT Ditjen SDPPI yang telah dicapai dalam kurun waktu 1 tahun pembangunan ZI.

Hasil Survei Pembangunan ZI WBK Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta Tahun 2024 IIPP/IKM 3.85 (Sangat Baik) dan IPAK/IPKP 3.85 (Sangat Baik).

7. Efisiensi

Efisiensi yang dilakukan dari kegaiatan sosialisasi frekueansi radio kepada masyarakat yaitu dengan strategi sebagai berikut:

- Pemanfaatan pegawai internal untuk menjadi tim pelaksana kegiatan sesuai dengan keahlian dari pegawai yang bersangkutan
- Melakukan survey lokasi kegiatan dengan teliti sesuai dengan kebutuhan
- Mencari target peserta sosialisasi sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan anggaran
- Memilih lokasi kegiatan yang strategis untuk dijangkau peserta kegiatan





8. Benchmarking capaian dengan UPT lain

Sepanjang Tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi frekuensi radio kepada masyarakat radio sebanyak 2 kali dan survei kepuasan masyarakat sejak bulan Januari hingga Desember 2024. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja dengan UPT lainnya:

Name LIDT	Hasil Survei Kepu	Canaian Kinayin	
Nama UPT	IKM/IPKP	IIPP/IPAK	Capaian Kinerja
Balmon Jakarta	3.85	3.85	100%
Balmon Tangerang	3.86	3.94	100%
Balmon Semarang	3.57	3.76	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, Balmon Tangerang, dan Balmon Semarang telah mencapai target kinerja dari penyelenggaraan Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat.

Dalam hal memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan optimal kepada masyarakat, meningkatkan komitmen dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, dan melakukan inovasi.

9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) <u>Bimbingan Teknis</u> <u>SRC/LRC</u>	100%	100%

1. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Sertifikasi Operator Radio (SOR) SRC/LRC agar para nelayan atau nahkoda memiliki pemahaman tentang penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya serta tata cara komunikasi radio ketika sedang berlayar di laut. Diharapkan dengan adanya Bimbingan Teknis SRC/LRC ini dapat mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan sesuai peruntukannya sehingga tidak menyebabkan interferensi bagi pengguna lain di kanal yang berbeda.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC adalah nelayan, nahkoda, atau awak kapal yang belum memiliki Sertifikasi Operator Radio (SOR) untuk mengoperasikan alat komunikasi radio antar kapal maupun antar stasiun radio pantai.

3. Capaian Target

Indikator Kinerja Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I JakartaBalai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakartadengan target 100 Peserta, telah terealisasi dengan capaian 114 Peserta dengan realisasi kegiatan 100%. Adapun Pagu Anggaran Tahun 2024 untuk kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC sebesar Rp. 33.486.000.-, dan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 33.386.400,- (99,70%).

Pada Tahun Anggaran 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta melaksanakan program kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SOR) untuk nelayan dengan realisasi kegiatan sesuai rencana dan target 100% yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan di ruang aula Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru dan Ruang Aula Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabulan (KSOP) Muara Angke. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan pihak Kesyahbandaran dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut:

- Sosialisasi dan Bimtek SOR Non Solas tahap I, dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024; dengan sertifikat yang diterbitkan dan dicetak untuk peserta adalah Long Range Certificate (LRC) dan IKRAN sebanyak 64 sertifikat sesuai jumlah peserta yang hadir;
- Sosialisasi dan Bimtek SOR Non Solas tahap II, dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024; dengan sertifikat yang diterbitkan dan dicetak untuk peserta adalah Long Range Certificate (LRC) sebanyak 50 sertifikat sesuai jumlah peserta yang hadir;

Manfaat dari terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SOR) SRC/LRC ini yaitu:

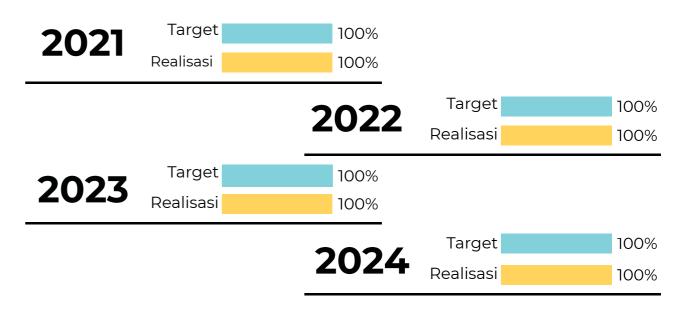
- ·Keselamatan: Memungkinkan komunikasi cepat dan akurat dalam situasi darurat, seperti cuaca buruk atau masalah di kapal
- Efisiensi: Memungkinkan mengoptimalkan penggunaan frekuensi dan menghindari gangguan komunikasi
- Kualitas SDM: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor maritim
- Kepatuhan regulasi: Menjamin penggunaan frekuensi radio yang sesuai peraturan
- Kewenangan: Memberikan kewenangan untuk mengoperasikan alat dan perangkat telekomunikasi khusus
- Kebencanaan: Mendukung komunikasi kebencanaan

Berikut adalah capaian kinerja periode 4 tahun terakhir:

Berikut ini adalah perbandingan capaian untuk indikator kinerja "Bimbingan Teknis SRC/LRC" periode 4 (empat) tahun terakhir:



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa secara akumulatif sejak tahun 2021 Balmon Jakarta telah melakukan bimbingan teknis sertifikasi SRC/LRC/IKRAN terhadap 616 Nelayan / Anak Buah Kapal. Berikut adalah persentase capaian kinerja periode 2021 s.d 2024:



Selama penyelenggaraan Bimtek SRC/LRC sejak Tahun 2021, Balmon Jakarta mampu untuk mempertahankan capaian kinerja hingga dapat selalu mencapai target kinerja yang sudah direncanakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan kegiatan yang terlaksana dilakukan dengan tepat dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim yang terlibat, serta dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Balmon Jakarta Jakarta senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan terus berinovasi untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang pesat. Melalui program Bimbingan Teknis SRC/LRC, diharapkan para nelayan / ABK dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam bidang pekerjaannya. Dengan demikian, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tidak hanya dapat mempertahankan kinerja yang baik, tetapi juga terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

4. Inovasi /Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC tahun 2024 oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah terealisasi dan mencapai target yang direncanakan dengan memperbaiki tingkat pelayanan, antara lain:

- Melakukan koordinasi intens dengan pihak PPSNZJ dan KSOP IV Muara Angke terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis
- Melakukan persiapan secara matang sebelum kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan
- Bekerjasama dengan pihak kesyahbandaran untuk menjadi narasumber bimbingan teknis.
- Melakukan publikasi informasi kepada para pemilik kapal agar para awak kapalnya dapat mengikuti Bimbingan Teknis SRC/LRC
- Melakukan asistensi pendaftaran Sertifikasi Operator Radio (SOR) dan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN).

5. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator tersebut

Merencanakan program kerja baru sebagai inovasi atau peningkatan kualitas pelayanan terkait Bimbingan Teknis SRC/LRC kepada para nelayan atau awak kapal dengan menjangkau lebih banyak nelayan yang berada di Pelabuhan Perikanan Muara Baru dan Muara Angke.

6. Implementasi budaya nilai



Dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio kepada Masyarakat, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut :

A. Berorientasi pelayanan

- Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat Nelayan, pemilik maupun pengurus izin kapal yang mengajukan Sertifikasi Operator Radio.
- Memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan dan memberikan bimbingan teknis secara komprehensif kepada para nelayan dan awak kapal.
- Melakukan evaluasi kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

B. Akuntabel

- Petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik negara untuk kegiatan pelayanan dengan secara baik, efektif dan efisien;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

C.Kompeten

- Petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/ kemampuan diri dalam segala hal yang diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi;
- Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.

D. Harmonis

 Petugas pelayanan mampu melayani peserta bimbingan teknis dengan ramah dan tenang dalam menyampaikan penjelasan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami tanpa membedakan latar belakang yang dimiliki oleh peserta.

E. Loyal

 Menjaga nama baik instansi dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC bagi nelayan dan awak kapal dengan menyusun jadwal kegiatan agar kegiatan berlangsung dengan tertib dan nyaman.

F. Adaptif

• Petugas pelayanan tanggap dan mampu menjawab pertanyaan para nelayan terkait penggunaan alat atau perangkat komunikasi radio;

G. Kolaboratif

 Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak/instansi terkait di pelabuhan untuk mendorong kesadaran para Nelayan dalam mengikuti bimbingan teknis SRC/LRC dan tertib penggunaan frekuensi radio khususnya dinas Maritim.

7. Efisiensi

Penyelenggaraan Bimtek SRC/LRC kepada nelayan diselenggarakan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di ruang Aula Kantor Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baru dan Ruang Aula KSOP IV Muara Angke sehingga tidak membutuhkan biaya sewa gedung. Narasumber/Pemateri Bimtek SRC/LRC juga berasal dari internal Infradigi, sehingga tidak dibutuhkan biaya honor narasumber.





8. Benchmarking capaian dengan UPT lain

Sepanjang Tahun 2024 Balmon Jakarta menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC sebanyak 2 kali dalam setahun. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja dengan UPT lainnya:

Nama UPT	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Sertifikat / Peserta	Capaian Kinerja
Balmon Jakarta	2	114	100%
Balmon Semarang	1	71	100%
Balmon Tangerang	2	86	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, Balmon Tangerang, dan Balmon Semarang sama-sama dapat mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun Balmon Semarang memiliki jumlah penyelenggaraan Bimtek SRC/LRC yang lebih sedikit yaitu hanya satu kali dibandingkan dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dan Balmon Tangerang yang sama-sama menyelenggarakan sebanyak dua kali. Dalam hal ini ketiga Balmon dapat mengoptimalkan anggaran secara efektif dan efisien hingga dapat mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	100%	100%

Pada Tahun 2024 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah melanjutkan penyelenggaraan kegiatan Maritim On The Spot (MOTS) dan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) di wilayah DKI Jakarta tepatnya di Loket Pelayanan Terpadu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Sejak dibukanya loket pelayanan perizinan Maritim di pelabuhan PPSNZ Jakarta di Muara Baru dari tahun 2019 sampai saat ini ada sebanyak 1231 ISR Kapal yang sudah diterbitkan dari jumlah Kapal sebanyak kurang lebih 1345 Kapal yang terdaftar beroperasi di pelabuhan PPS Nizam Zachman dan IKRAN sebanyak 112.

Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) adalah Izin untuk mendirikan, memiliki dan mengoperasikan stasiun radio bagi Nelayan untuk penggunaan frekuensi radio di pita HF Non GMDSS. IKRAN merupakan kebijakan Kemeterian Komunikasi dan Informatika untuk membantu Nelayan Indoneisa dengan menyediakan kanal/frekuensi khusus di band HF sebagai legalitas untuk kebutuhan komunikasi nelayan yang bersifat pribadi dan bukan marabahaya dengan perangkat radio non maritim ketika melaut, yang pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Infradigi Nomor 128 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Uji Coba Penggunaan Frekuensi Radio untuk Komunikasi Nelayan.

1. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Berdasarkan hasil monitoring/pemantauan kami selama ini telah menemukenali beberapa sumber permasalahan yang berkaitan dengan gangguan yang ditimbulkan oleh frekuensi Maritim, yaitu penggunaan radio komunikasi secara tidak tepat oleh kapal - kapal nelayan dan penggunaan perangkat non - maritime yang jumlahnya banyak untuk komunikasi kapal - kapal nelayan, baik yang berbobot kurang dari 30 GT dengan jarak jangkauan kurang dari 40 Km maupun kapal yang berbobot lebih dari 30 GT. Berbagai permasalahn tersebut membuat Indonesia sering mendapat laporan yang terkait gangguan radio penerbangan dari FCC (Federal Communication Comission) dan IARU (International Radio Amateur Union).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pencegahan penggunaan frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai standar atau peruntukannya sehingga dapat menimbulkan gangguan atau interferensi bagi pengguna lain, bahkan dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan kemudahan dalam proses perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim untuk mendorong kesadaran Nelayan atau pemilik kapal untuk menggunakan frekuensi radio yg legal dan memberikan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penggunaan spektrum frekuensi radio kepada masyarakat nelayan dan atau pemilik kapal

melalui kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SOR) agar mempunyai pemahaman tentang penggunaan spektrum frekuensi radio serta tata cara berkomunikasi saat menghadapi kondisi darurat atau menghadapi marabahaya di laut. Dengan ini diharapkan dapat mewujudkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya serta bebas dari dari segala gangguan (interferensi).

2. Sasaran Kegiatan

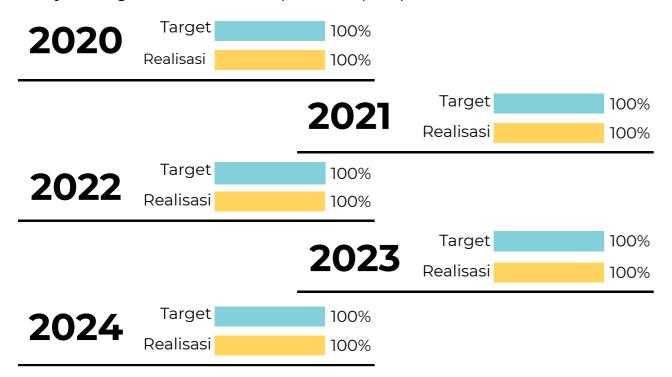
Sasaran kegiatan Maritim On The Spot (MOTS) adalah kapal – kapal Nelayan yang belum memiliki ISR dan para Nelayan atau awak kapal yang belum memiliki Sertifikat Operator Radio (SOR) dengan hasil kegiatan berupa penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim dan Sertifikasi Operator Radio (SOR) Short Range Certificate/Long Range Certificate (SRC/LRC). Penerbitan ISR Maritim sebagai persyaratan komunikasi bagi kapal-kapal laut dalam hal komunikasi marabahaya dan izin bersandar di Pelabuhan. Sementara Sertifikasi Operator Radio diperuntukkan bagi Nahkoda dan ABK untuk mengoperasikan alat komunikasi radio antar kapal maupun antar stasiun radio pantai dengan mengikuti bimbingan teknis SRC/LRC.

3. Capaian Target

Indikator KinerjaPersentase terlaksananya kegiatan pelayanan Maritim On The Spot (MOTS) di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dengan target 100% (100 ISR), telah terealisasi dengan capaian 316% (252 ISR + 64 IKRAN) dengan realisasi kegiatan 100%. Adapun Pagu Anggaran Tahun 2024 untuk kegiatan pelaksanaan Maritime On The Spot sebesar Rp. 144.452.000.-, dan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 143.595.170,- (99,41%).

Pencapaian ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya serta komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan Maritim On The Spot (MOTS). Dengan keberhasilan melebihi target yang ditetapkan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tidak hanya menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran tetapi juga dalam optimalisasi penggunaan anggaran. Ke depan, diharapkan bahwa keberhasilan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, serta menjadi contoh bagi unit kerja lainnya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan industri terkait. Selain itu, evaluasi berkala dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi fokus utama agar layanan yang diberikan semakin berkualitas dan mampu menjawab tantangan yang ada di masa mendatang.

Berikut ini adalah perbandingan capaian untuk indikator kinerja "Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN" periode 5 (lima) tahun terakhir:



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Penerapan pelayanan prima dan kualitas SDM yang baik terlihat dalam perizinan ISR Maritim-MOTS dan IKRAN. Fokus pada pelatihan dan pengembangan SDM memastikan tim memiliki kompetensi untuk memberikan layanan terbaik. Dengan semangat kolaboratif, Balai Monitor siap menghadapi tantangan di masa depan dan berkomitmen untuk melampaui harapan masyarakat.

4. Inovasi /Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

Penyelenggaraan kegiatan MOTS tahun 2024 oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah terealisasi dan mencapai target yang direncanakan dengan memperbaiki tingkat pelayanan, antara lain:

- Loket dibuka setiap hari kerja di Kantor Pelayanan Terpadu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ);
- Memberikan layanan asistensi dan konsultasi perizinan secara offline (luring) melalui loket dan online (daring) melalui WhatsApp;
- Melaksanakan koordinasi dengan pihak PPSNZJ terkait pelaksanaan pelayanan perizinan;
- Melakukan pendekatan dan koordinasi door to door dengan pihak pemilik dan pengurus kapal;
- Melakukan asistensi pendaftaran Sertifikasi Operator Radio (SOR) dan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN).

Merencanakan program kerja baru sebagai inovasi atau peningkatan pelayanan kami terkait perizinan ISR Maritim kepada para nelayan atau pemilik kapal dengan Bus Pelayanan Keliling / Kegiatan Pelayanan Begerak Perizinan ISR Maritim yang secara terjadwal akan beroperasi di wilayah Pelabuhan Nizam Zachman di Muara Baru dan Pelabuhan Muara Angke.

6. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK Bereintasi Pelayanan Akutabel Kompeten Hormonis loyal Adaptit Kolaboratif

Dalam penyelenggaraan kegiatan MOTS ini, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut :

A. Berorientasi pelayanan

- Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat Nelayan, pemilik maupun pengurus izin kapal yang mengajukan proses perizinan ISR Maritim, Sertifikasi Operator Radio dan IKRAN
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi pelabuhan terkait dan metode pendekatan kepada Nelayan, pemilik maupun pengurus kapal secara door to door dalam rangka pembinaan dan kerjasama mewujudkan tertib perizinan dan penggunaan frekuensi radio Maritim sesuai peraturan.
- Memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pemohon izin.
- Melakukan evaluasi kegiatan MOTS untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

B. Akuntabel

- Petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik negara untuk kegiatan pelayanan dengan secara baik, efektif dan efisien;
- Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

C. Kompeten

- Petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/ kemampuan diri dalam segala hal yang diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi;
- Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.

D. Harmonis

 Petugas pelayanan mampu melayani pemohon izin dengan ramah dan tenang dalam menyampaikan penjelasan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami tanpa membedakan latar belakang yang dimiliki pemohon izin.

E. Loyal

 Taat dan tertib dalam menjalankan setiap proses perizinan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang ditetapkan dan secara rutin melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan.

F. Adaptif

- Petugas pelayanan tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait peraturan dan alur proses perizinan yang terjadi sewaktu – waktu;
- Berkontribusi dalam perbaikan pelayanan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi dalam peraturan maupun proses perizinan kepada masyarakat dengan cepat dan mudah dipahami.

G. Kolaboratif

• Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak/instansi terkait di pelabuhan untuk mendorong kesadaran para Nelayan dalam mengurus perizinan ISR Maritim dan tertib penggunaan frekuensi radio khususnya dinas Maritim.

7. Efisiensi

Bekerjasama dengan pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta untuk menyediakan Loket MOTS di Kantor Pelayanan Terpadu Pelabuhan Nizam Zachman Jakarta di Muara Baru, dan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SOR) ke nelayan juga diselenggarakan di ruang Aula Kantor Pelabuhan Nizam Zachman Jakarta dan Aula Pelabuhan Muara Angke sehingga tidak membutuhkan biaya sewa gedung. Pemateri Bimtek SOR juga berasal dari internal Infradigi, sehingga tidak dibutuhkan biaya honor narasumber.

8. Benchmarking capaian dengan UPT lain

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja Pelayanan Perizinan ISR Maritim-MOTS dan IKRAN dengan UPT lainnya:

Nama UPT	Target ISR-IKRAN	Capaian ISR-IKRAN	Persentase
Balmon Jakarta	100	316	100%
Balmon Semarang	85	168	100%
Balmon Tangerang	45	64	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memiliki jumlah capaian ISR Maritim – IKRAN yang lebih banyak dibandingkan dengan Balmon Semarang dan Balmon Tangerang meskipun ketiga Balmon sama-sama dapat mencapai target kinerja yang direncanakan. Target pelayanan ISR Maritim – IKRAN dapat tercapai



melalui peningkatan kualitas layanan, penerapan standar pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor-faktor pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah profesionalisme sumber daya aparatur, kelembagaan pemerintah yang tepat, aturan (sistem) yang jelas, pengawasan dan akuntabilitas lingkungan pemerintahan yang sehat.









11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	100%

1. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Kegiatan verifikasi data koordinat situs ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) memperlihatkan urgensi akan akurasi dan kepatuhan dalam mencatat lokasi fisik dari peralatan telekomunikasi. Dalam lingkungan telekomunikasi yang terus berkembang, kepastian akan posisi yang tepat dari antena microwave, perangkat penyiaran, dan infrastruktur terkait lainnya menjadi krusial. Data koordinat yang terverifikasi dengan benar bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan beroperasi pada kinerja optimal, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dengan memanfaatkan sumber daya dengan efisiensi maksimal.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan verifikasi data koordinat situs ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) adalah

untuk memastikan bahwa operasinya sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam industri telekomunikasi. Verifikasi data koordinat membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi persyaratan peraturan terkait pelaporan dan dokumentasi lokasi infrastruktur telekomunikasi. Dengan memastikan data koordinat yang tepat, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dapat memastikan bahwa situs-situs telekomunikasi terletak di lokasi yang aman dan tidak memberikan risiko bagi keamanan nasional atau masyarakat umum. Terakhir, dengan penggunaan QR Code Site yang semakin meluas dalam manajemen infrastruktur telekomunikasi, verifikasi data koordinat juga mendukung kesuksesan implementasi QR Code Site, memastikan bahwa informasi yang terkait dengan setiap situs telekomunikasi terhubung dengan lokasi yang tepat dan akurat.

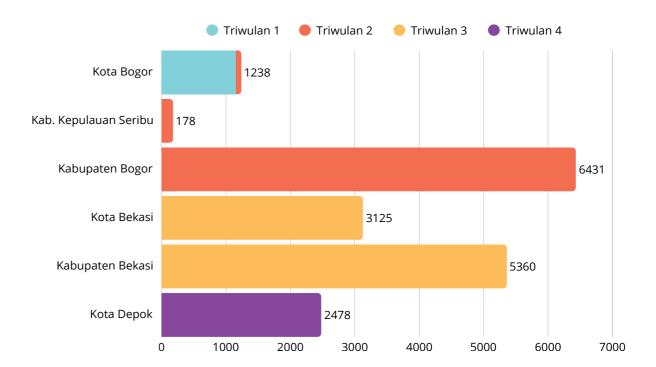
2. Sasaran Kegiatan

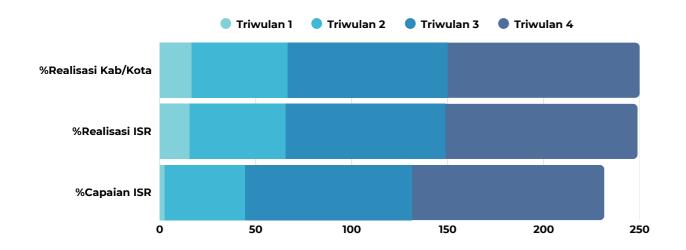
Berikut sasaran kegiatan verifikasi data koordinat situs ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) di Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta selama Tahun 2024 dengan target capaian 100% (merujuk pada Nota Dinas No. 176/DJSDPPI.3/PR.04.07/02/2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal Penetapan Kinerja (PK) UPT dan Manual IKU Tahun 2024 terkait Direktorat Operasi Sumber Daya):

- Melaksanakan kegiatan verifikasi data koordinat situs ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) dengan target jumlah ISR (Sampling) menyesuaikan target jumlah ISR yang menjadi lokus Prima Aksi 2024 (Mwlink dan Penyiaran) yaitu sebesar 49,3% dari total seluruh ISR MW Link dan penyiaran Tahun 2024 di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta untuk 6 wilayah Kabupaten/Kota.
- Mengevaluasi capaian dengan laporan per triwulan (4 Laporan per Tahun).

3. Capaian Target

Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta mampu melaksanakan verifikasi data koordinat situs ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) pada tahun 2024 sebanyak 18.810 ISR dari total target sebanyak 18.810 ISR sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Kelas I Jakarta mampu mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:





Capaian Target 2 Tahun Terakhir (2023 - 2024)





Indikator Kinerja Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta pada tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun 2024 dengan target sebesar 100%, telah terealisasi dengan capaian 100% atau sebanyak 18.950 ISR pada Tahun 2023 dan 18.810 ISR pada Tahun 2024.

5. Inovasi / Analisa keberhasilan / ketidaktercapaian

Beberapa faktor keberhasilan dalam kegiatan verifikasi data koordinat situs ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) antara lain:

- Memiliki tim yang terlatih dan memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan verifikasi data koordinat dengan cermat dan efisien merupakan faktor penting. Ini mencakup personel yang kompeten dan peralatan yang diperlukan untuk mengumpulkan dan memvalidasi data dengan akurat. Koordinasi yang baik antara pemerintah selaku regulator dengan penyelenggara telekomunikasi dalam pelaksanaan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi.
- Menggunakan teknologi dan perangkat lunak yang tepat untuk memperoleh, memvalidasi, dan merekam data koordinat dengan akurat dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan kegiatan verifikasi.
- Memilih metode verifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik situs ISR Microwave Link dan Penyiaran dapat membantu memastikan akurasi dan efisiensi dalam mengumpulkan data koordinat.
- Melakukan validasi dan pengujian secara menyeluruh terhadap data yang terverifikasi untuk memastikan keabsahan dan keakuratannya sebelum diintegrasikan.

A.Kendala dalam kegiatan verifikasi data koordinat situs ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) antara lain:

- Beberapa site telekomunikasi mungkin sulit diakses karena berada di daerah terpencil, pegunungan, atau wilayah yang sulit dijangkau (rooftop gedung). Hal ini dapat menyulitkan proses verifikasi data koordinat.
- Infrastruktur telekomunikasi yang kompleks, dengan banyak situs dan peralatan yang tersebar luas, dapat meningkatkan kesulitan dalam verifikasi data koordinat.
- Kesalahan manusia seperti kesalahan pengukuran atau pencatatan koordinat, ketidakcocokan data, atau kelalaian dalam proses verifikasi dapat menghasilkan data yang tidak akurat atau tidak dapat diandalkan.

Rekomendasi

Langkah-langkah yang perlu diambil pada tahun 2025 untuk memperkuat dan mengembangkan hasil yang sudah dicapai pada tahun 2024, serta mengoptimalkan efektivitas Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) di tahun berikutnya:

- ·Tinjau ulang laporan dan hasil verifikasi yang dilakukan di 2024 untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangannya.
- Petakan site-site dengan tingkat kesalahan atau ketidaksesuaian tertinggi sebagai fokus pengawasan di tahun berikutnya.
- ·Lakukan pelatihan internal berkala bagi personel terkait (misalnya PPNS, petugas pengendali frekuensi, teknisi lapangan) agar prosedur tetap konsisten.
- Perkuat koordinasi dengan operator telekomunikasi dan penyelenggara siaran, untuk memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan dan kondisi fisik di lapangan.
- Fokuskan kegiatan verifikasi tahun 2025 pada wilayah dengan pertumbuhan site tinggi dan yang sebelumnya belum diverifikasi secara menyeluruh.

5. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator tersebut

- Telah dilakukan verifikasi ulang data yang tidak valid atau tidak lengkap dari hasil 2023.
- Telah dilakukan penghapusan data ganda atau lokasi fiktif melalui koordinasi dengan operator.
- Telah dilakukan evaluasi kinerja petugas verifikasi tahun 2023

6. Implementasi budaya nilai



Implementasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sangat penting dalam kegiatan verifikasi data koordinat situs ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site). Berikut adalah beberapa contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan prinsip-prinsip ini:

A. Berorientasi pelayanan

 Tim yang terlibat dalam verifikasi data koordinat harus memiliki fokus yang kuat pada kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan. Mereka harus siap untuk memberikan pelayanan yang baik dan responsif dalam menjawab pertanyaan atau kebutuhan terkait dengan data koordinat.

B. Akuntabilitas

 Proses verifikasi data koordinat harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup pencatatan yang akurat dari setiap langkah dalam proses verifikasi, serta memastikan bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji ulang.

C. Kompetensi

 Tim yang melakukan verifikasi data koordinat harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam teknik pengukuran, penggunaan perangkat lunak GIS (Geographic Information System), dan pemahaman yang baik tentang regulasi telekomunikasi yang relevan.

D. Harmonis

 Kerja sama yang harmonis antara anggota tim dan dengan pihak lain yang terlibat dalam proses verifikasi, seperti pemilik situs, operator jaringan, dan otoritas regulasi, sangat penting. Ini akan memastikan bahwa proses berjalan lancar dan tanpa hambatan.

E. Loyalitas

 Anggota tim harus mematuhi standar etika profesional dan kode perilaku yang relevan dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus berkomitmen untuk bertindak secara jujur dan terpercaya dalam semua aspek kegiatan verifikasi data koordinat.

F. Adaptif

• Tim harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kondisi yang mungkin terjadi selama proses verifikasi. Ini bisa termasuk mengatasi kendala teknis, perubahan cuaca, atau perubahan kebijakan yang memengaruhi akses ke situs telekomunikasi.

G. Kolaboratif

 Kolaborasi yang efektif antara anggota tim dan dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemilik situs, operator jaringan, dan badan regulasi, dapat meningkatkan keberhasilan dan efisiensi proses verifikasi. Hal ini termasuk berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

7. Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi data koordinat situs ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)., dilakukan beberapa cara berikut:

 Menerapkan teknologi seperti perangkat GPS yang akurat dan perangkat lunak GIS (Geographic Information System) dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi proses pengumpulan data koordinat. Automatisasi dalam pengolahan data juga dapat membantu meningkatkan efisiensi.

- Memiliki tim yang terlatih dan berpengalaman dalam kegiatan verifikasi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data koordinat. Tim yang efisien dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat.
- Mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda, seperti pemetaan satelit, data survei lapangan, dan database internal perusahaan, dapat membantu menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang lokasi situs telekomunikasi.
- Berkolaborasi dengan pemilik situs, otoritas regulasi, dan penyedia layanan telekomunikasi lainnya dapat membantu dalam pengumpulan informasi yang diperlukan secara lebih efisien. Berbagi data dan sumber daya juga dapat meningkatkan efisiensi.
- Membuat dan menerapkan standar operasional yang jelas dan terstruktur untuk kegiatan verifikasi data koordinat dapat membantu meningkatkan konsistensi, akurasi, dan efisiensi proses tersebut.

Dengan menerapkan beberapa cara di atas, maka efisiensi sisi sumber daya manusia, efisiensi waktu pelaksanaan dan efisiensi pelaporan dalam kegiatan Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) dapat tercapai.

8. Benchmarking dengan UPT Lain

Berikut adalah perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) atau PrimaAksi antara Balmon Jakarta dengan Balmon Tangerang:

Balmon Jakarta	Target	100%
	Realisasi	100%
	Target	100%
Balmon Tangerang	Realisasi	100%

Pada Tahun 2024 Balmon Jakarta dan Balmon Tangerang masing-masing dapat mencapai target kinerja yang sudah direncanakan. Meskipun dalam jumlah ISR yang menjadi target berbeda yaitu Balmon Jakarta dengan 18.810 ISR dan Balmon Tangerang dengan 8.062 ISR. Keberhasilan pencapaian kinerja ini merupakan hasil dari sinergitas tim yang terbangun dengan baik, ditopang oleh komunikasi yang efektif, kerja sama yang solid dengan para stakeholder, serta komitmen bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada Sasaran Kinerja 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian				
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infradigi	89	90, 97				

1. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Ditjen Infradigi, bertugas mengawasi dan mengendalikan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta (termasuk Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu), Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Dalam menjalankan tugas pelayanannya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta didukung oleh Subbagian Umum yang berperan dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga.

Target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Indikator pencapaiannya diukur melalui Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infradigi dengan target nilai sebesar 89. Penilaian ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi anggaran yang didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi. Dengan langkah ini, diharapkan kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Indikator pencapaian sasaran tersebut diukur melalui Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infradigi dengan target nilai sebesar 89.

Penilaian terhadap capaian nilai tersebut dilakukan berdasarkan dua komponen utama dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

- Capaian Nilai Kinerja SMART DJA dengan bobot 50%
- Nilai Kinerja IKPA dengan bobot 50%

Kombinasi kedua aspek tersebut diharapkan dapat mencerminkan pencapaian kinerja anggaran yang optimal dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola birokrasi.

3. Capaian Target

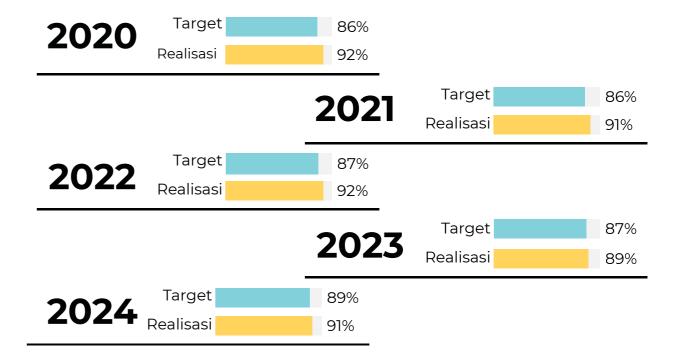
Capaian target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infradigi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Target yang sebelumnya ditentukan sebesar 89, berhasil dicapai dengan hasil sebesar 90,97. Perhitungan capaian tersebut terdiri atas:

- Nilai kinerja SMART DJA sebesar 85,70 x 50% = 51,42%.
- Nilai IKPA = 95,02 x 50% = 38,008%.

Penjumlahan kedua skor tersebut menghasilkan total capaian sebesar 90,97%, menunjukkan kinerja yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran di Balmon SFR Kelas I Jakarta.

Berikut dilampirkan hasil capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama 5 tahun terakhir :

Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian										
	Killerja	2020	2021	2022	2023	2024						
Meningkat nya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infradigi	92.31	91, 16	91, 57	89.3	90.97						



Fenomena naik-turunnya capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama lima tahun terakhir, meskipun tetap melampaui target, dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Dinamika Perubahan Kebijakan

Setiap tahun, kebijakan pemerintah terkait pengelolaan anggaran dapat mengalami penyesuaian, baik dari sisi prioritas program, realokasi anggaran, maupun mekanisme pelaksanaan. Perubahan ini dapat memengaruhi kinerja meskipun masih dalam koridor pencapaian yang baik.

2. Fluktuasi dalam Realisasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program yang memiliki kompleksitas tinggi atau menghadapi kendala operasional (seperti penyesuaian jadwal, perubahan vendor, atau masalah teknis) bisa menyebabkan capaian yang berfluktuasi. Meski demikian, langkah mitigasi yang efektif dapat memastikan hasil tetap di atas target.

3. Faktor Pandemi COVID-19 (2020-2022)

Selama masa pandemi, terdapat berbagai pembatasan yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penyesuaian strategi anggaran dan kebijakan operasional berperan besar dalam mempertahankan pencapaian yang baik meski di tengah keterbatasan.

4. Efektivitas Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang baik memungkinkan identifikasi cepat atas potensi kendala, sehingga dapat diambil langkah korektif secara tepat waktu. Hal ini membantu menjaga capaian kinerja tetap optimal meskipun terjadi tantangan.

5. Penyesuaian Prioritas Anggaran

Pergeseran prioritas anggaran, seperti pengalokasian dana untuk kebutuhan mendesak, dapat menyebabkan perbedaan pencapaian antar tahun. Namun, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya memungkinkan hasil tetap baik.

Kesimpulan

Meskipun hasil kinerja menunjukkan tren naik-turun, pencapaian yang selalu melampaui target mencerminkan keberhasilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam mengelola sumber daya secara efektif, beradaptasi dengan perubahan kebijakan, dan menerapkan mitigasi yang tepat terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.

4. Inovasi / Analisa Keberhasilan / Ketidaktercapaian

Keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran yang dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta didukung oleh beberapa faktor kunci yang berperan penting dalam menjaga pencapaian yang konsisten tinggi, yaitu:

1. Kualitas Perencanaan yang Baik

Revisi DIPA

Penyesuaian anggaran melalui revisi DIPA dilakukan secara cermat untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan prioritas atau kondisi yang tidak terduga.

Deviasi Halaman III DIPA

Pengendalian deviasi pada Halaman III DIPA dilakukan secara ketat agar tidak terjadi selisih signifikan antara rencana awal dan realisasi anggaran, yang mencerminkan perencanaan yang matang.

2. Kualitas Pelaksanaan yang Optimal

Faktor utama yang berkontribusi pada pencapaian ini meliputi:

- Realisasi anggaran dilakukan secara efektif sesuai jadwal tanpa penumpukan di akhir tahun.
- Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan rekanan pihak ketiga dilakukan secara terjadwal, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.
- Proses penyelesaian tagihan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi penundaan pembayaran.
- Dana yang bersifat Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dikelola dengan baik, sehingga pencairan dana berjalan tepat waktu.
- Tidak adanya penolakan SPM oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mencerminkan ketelitian dalam administrasi keuangan dan pemenuhan persyaratan yang baik.

Kombinasi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, dan pengelolaan keuangan yang tertib menjadi kunci utama keberhasilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam mencapai Nilai Kinerja Anggaran yang melampaui target selama lima tahun terakhir.

5. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan indikator tersebut

Sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja dan memperbaiki indikator Nilai Kinerja Anggaran, langkah-langkah tindak lanjut berikut telah diterapkan:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Berbasis Data

Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan analisis data historis, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta proyeksi kebutuhan yang lebih akurat. Pendekatan ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih realistis dan mengurangi risiko deviasi yang besar pada akhir tahun.

2. Optimalisasi Manajemen Risiko

Mengidentifikasi potensi risiko dalam pengelolaan anggaran sejak awal tahun anggaran, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau perubahan kebijakan yang mendadak. Penerapan strategi mitigasi risiko memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana.

3. Penjadwalan Kegiatan yang Lebih Tertata

Menyusun jadwal kegiatan secara proporsional sepanjang tahun untuk menghindari penumpukan kegiatan dan pembayaran di akhir tahun. Penjadwalan yang baik memastikan sumber daya keuangan dan manusia dapat dimanfaatkan lebih efektif.

4. Penguatan Koordinasi Internal dan Eksternal

Meningkatkan sinergi dengan unit kerja internal terkait untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai target. Koordinasi dengan pihak eksternal seperti KPPN dan mitra kerja (pihak ketiga) dilakukan secara proaktif untuk menghindari keterlambatan dalam pembayaran tagihan dan penyelesaian kontrak.

5. Peningkatan Kontrol atas Kegiatan Kontraktual

Menjalin komunikasi yang intensif dengan rekanan pihak ketiga agar proses pengadaan dan penyelesaian tagihan dapat berjalan sesuai jadwal. Penjadwalan pembayaran yang lebih terencana mengurangi risiko keterlambatan pencairan anggaran.

6. Monitoring dan Evaluasi yang Proaktif

Meningkatkan frekuensi evaluasi internal untuk menilai capaian realisasi anggaran, memetakan potensi deviasi, dan menyiapkan langkah perbaikan lebih dini. Evaluasi ini dilakukan minimal pada akhir setiap triwulan untuk mengidentifikasi potensi kendala dan memastikan penyerapan anggaran sesuai dengan target.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran yang efektif dan efisien, sekaligus mempertahankan pencapaian kinerja yang melampaui target secara berkelanjutan.

6. Implementasi budaya nilai

Pelayanan/ Akuntabel/ Kompeten/ Harmonis/ Loyal/ Adaptif/ Kolaboratif)

Dalam proses pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infradigi tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah mengimplementasikan budaya nilai berakhlak sebagaimana berikut ini:



A. Berorientasi pelayanan

- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan yang prima dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.
- Untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif, setiap kegiatan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

B. Akuntabel

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta menegakkan akuntabilitas melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pelaporan dilakukan secara berjenjang dan disertai bukti pendukung yang lengkap untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Kompeten

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta terus mendorong pengembangan keahlian pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang relevan. Pegawai didorong untuk mengikuti pelatihan di bidang keuangan, administrasi, dan teknologi guna mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan pegawai mampu mengaplikasikan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.

D. Harmonis

Membangun komunikasi yang terbuka antarpegawai menjadi langkah utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Diskusi rutin, kegiatan kebersamaan, serta pendekatan kerja tim diterapkan untuk memperkuat solidaritas dan rasa kekeluargaan di lingkungan kerja. Dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan positif, diharapkan setiap individu mampu bekerja dengan lebih baik dan berkontribusi maksimal.

E. Loyal

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta menanamkan nilai loyalitas dengan menekankan pentingnya komitmen terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Pegawai diarahkan untuk selalu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, sehingga keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kemajuan lembaga.

F. Adaptif

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, baik terkait kebijakan anggaran, perkembangan teknologi, maupun metode kerja terkini. Inovasi terus didorong agar proses pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program tetap relevan dan efektif di tengah tantangan yang berkembang.

G. Kolaboratif

Setiap kegiatan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dilaksanakan dengan semangat kerja sama yang kuat. Kolaborasi dilakukan tidak hanya di lingkungan internal tetapi juga dengan instansi terkait seperti KPPN, mitra kerja, dan pihak ketiga lainnya. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan dengan lancar, terintegrasi, dan sesuai target yang ditetapkan.

7. Efisiensi

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat, layanan publik, dan program dukungan manajemen tahun 2024 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang mencakup capaian output dan capaian indikator kinerja.

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Jakarta dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dapat dinilai cukup efisien. Dengan mengacu pada konsep dan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah dikelola dengan ekonomis, efektif, dan cukup efisien.

Dalam rangka memberikan informasi kinerja yang akuntabel mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran, penilaian kinerja anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang diperoleh dari nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dengan proporsi sebagai berikut:

IKPA: 50%SMART: 50%

Dengan penerapan konsep tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta terus berupaya memastikan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga mendukung pencapaian kinerja yang optimal untuk pelayanan masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

8. Dampak

Keberhasilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam mencapai target Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara operasional maupun strategis. Efektivitas dalam pemanfaatan anggaran tidak hanya memperkuat kinerja internal, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung stabilitas jaringan komunikasi, dan berkontribusi pada kemajuan sosialekonomi di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta.

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran yang berhasil dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memberikan berbagai dampak positif terhadap wilayah kerja yang meliputi:

1. Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Frekuensi Radio

- Dengan pencapaian kinerja anggaran yang optimal, alokasi sumber daya untuk pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dapat terlaksana dengan baik.
- Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, yang mencakup DKI Jakarta, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Kepulauan Seribu, dapat terlayani secara maksimal.
- Gangguan spektrum frekuensi yang berpotensi mengganggu layanan komunikasi publik dapat diminimalkan melalui peralatan yang lebih baik dan operasional yang optimal.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Dengan pemanfaatan anggaran yang efektif, layanan pengajuan izin frekuensi, pengawasan lapangan, dan penanganan gangguan frekuensi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan responsif.
- Hal ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan instansi yang mengandalkan stabilitas jaringan komunikasi untuk aktivitas sehari-hari.

3. Optimalisasi Penyerapan Anggaran untuk Kegiatan Strategis

- Anggaran yang digunakan secara efektif memastikan program kerja strategis, seperti pemantauan spektrum frekuensi, penertiban perangkat ilegal, dan sosialisasi penggunaan frekuensi dapat dilaksanakan secara tepat waktu.
- Dampaknya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dan stakeholder terhadap regulasi spektrum frekuensi, sehingga mengurangi potensi pelanggaran.

4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja

- Capaian kinerja anggaran yang optimal mendukung pengadaan peralatan pemantauan frekuensi modern yang lebih canggih, sehingga kualitas pengawasan meningkat.
- Sarana operasional seperti kendaraan, perangkat komunikasi, dan fasilitas kantor yang memadai berkontribusi pada kelancaran operasional di wilayah kerja yang luas dan beragam.

5. Penguatan Koordinasi dengan Stakeholder

- Pencapaian kinerja anggaran yang baik mencerminkan proses administrasi dan keuangan yang tertata dengan baik, sehingga mendukung kolaborasi yang lebih efektif dengan pihak eksternal.
- Koordinasi dengan instansi lain, seperti KPPN, operator telekomunikasi, dan pemerintah daerah, menjadi lebih lancar karena adanya kejelasan dalam perencanaan dan realisasi anggaran.

6. Percepatan Inovasi Layanan Digital

- Dengan anggaran yang teralokasi secara tepat, pengembangan sistem digital seperti pelayanan daring, pelaporan elektronik, dan pemantauan berbasis aplikasi dapat terlaksana dengan baik.
- Dampaknya adalah peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses oleh masyarakat.

7. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder

 Capaian kinerja yang optimal mencerminkan tata kelola anggaran yang baik dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat, instansi pemerintah lain, dan mitra kerja terhadap Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebagai institusi yang profesional dan kredibel.

9. Benchmarking UPT

Pada indikator kinerja ini, Balmon SFR Kelas I Jakarta melakukan benchmarking dengan Balmon SFR Kelas I Tangerang dikarenakan Nilai Kinerja Anggaran Balmon SFR Kelas I Tangerang lebih tinggi dari Balmon SFR Kelas I Jakarta, dengan capaian sebagai berikut:

Nama UPT	Target	Capaian					
Balmon SFR Kelas I Jakarta	89	90, 97					
Balmon SFR Kelas I Tangerang	88	92					

Dari hasil diatas dapat terlihat walaupun target dari Nilai Kinerja Anggaran Balmon SFR Kelas I Tangerang lebih kecil dari target Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta namun untuk capaiannya, Balmon SFR Kelas I Tangerang memperoleh nilai yang lebih tinggi.

Hal tersebut mungkin disebabkan karena Balmon SFR Kelas I Tangerang lebih mampu mengelola anggaran secara efektif dengan fokus pada hasil (output) yang sesuai rencana, dengan rincian sebagai berikut:

- Perencanaan yang matang sehingga target output lebih mudah dicapai
- Minimnya revisi POK yang menandakan stabilitas program
- Efektivitas pencapaian output yang mendukung prinsip value for money (ekonomi, efisiensi, efektivitas)

Dari penjelasan yang sudah disebutkan diatas menjadi acuan bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta kedepannya untuk mengikuti langkah-langkah tersebut agar Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 bisa tercapai lebih tinggi dan lebih baik lagi.

2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna **Anggaran (UAKPA)**

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100%	100%

1. Latar belakang, Maksud dan Tujuan

Nilai kualitas pelaporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan penting karena menjadi syarat karakteristik pelaporan keuangan yang dapat dipercaya oleh penggunanya.

Sasaran kinerja yang menjadi target perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguana Anggaran (UAKPA) yang ditargetkan tahun 2024 adalah sebesar 100%. Dengan indicator ini memberikan Gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di Tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA).

Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah berstruktur pada suatu periode pelaporan.



100%

Capaian 100%

Persentase 100%

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif dan Efisien yaitu Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tahun 2024 adalah sebesar 100%. Penilaian tersebut berdasarkan:

- Kepatuhan terhadap jadual yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- Tidak adanya pagu minus dan permasalahan dalam transaksi keuangan.

3. Capaian Target

Capaian target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah mencapai target sesuai yang ditargetkan pada perjanjian kinerja Tahun anggaran 2024 adalah sebesar 100%, berhasil dicapai dengan hasil sebesar 100%.

Sedangkan untuk Target Realisasi Anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Infradigi tahun 2024 adalah 98 %, sedangkan Realisasi Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tahun 2024 berhasil dicapai dengan hasil sebesar 98.19%.

Berikut dilampirkan hasil capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta selama 2 tahun terakhir:

2023





Naik turunnya Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas I Jakarta selama lima tahun terakhir, disebabkan beberapa factor, antara lain:

1. Dinamika Perubahan Kebijakan

Setiap tahun, kebijakan pemerintah terkait pengelolaan anggaran dapat mengalami penyesuaian, baik dari sisi prioritas program, realokasi anggaran, maupun mekanisme pelaksanaan. Perubahan ini dapat memengaruhi kinerja meskipun masih dalam koridor pencapaian yang baik.

2. Fluktuasi dalam Realisasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program yang memiliki kompleksitas tinggi atau menghadapi kendala operasional (seperti penyesuaian jadwal, perubahan vendor, atau masalah teknis) bisa menyebabkan capaian yang berfluktuasi. Meski demikian, langkah mitigasi yang efektif dapat memastikan hasil tetap di atas target.

3. Faktor Pandemi COVID-19 (2020-2022)

Selama masa pandemi, terdapat berbagai pembatasan yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penyesuaian strategi anggaran dan kebijakan operasional berperan besar dalam mempertahankan pencapaian yang baik meski di tengah keterbatasan.

4. Efektivitas Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang baik memungkinkan identifikasi cepat atas potensi kendala, sehingga dapat diambil langkah korektif secara tepat waktu. Hal ini membantu menjaga capaian kinerja tetap optimal meskipun terjadi tantangan.

5. Penyesuaian Prioritas Anggaran

Pergeseran prioritas anggaran, seperti pengalokasian dana untuk kebutuhan mendesak, dapat menyebabkan perbedaan pencapaian antar tahun. Namun, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya memungkinkan hasil tetap baik.

Kesimpulan

Meskipun hasil kinerja menunjukkan tren naik-turun, pencapaian yang selalu melampaui target mencerminkan keberhasilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam mengelola sumber daya secara efektif, beradaptasi dengan perubahan kebijakan, dan menerapkan mitigasi yang tepat terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.

4. Inovasi /Analisa keberhasilan/ketidaktercapaian

Keberhasilan nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dimulai dari :

1. Laporan Keuangan Yang lengkap

Pergeseran prioritas anggaran, seperti pengalokasian dana untuk kebutuhan mendesak, dapat menyebabkan perbedaan pencapaian antar tahun. Namun, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya memungkinkan hasil tetap baik.

2. Pengukuran Laporan Keuangan yang tidak bias

laporan tersebut disajikan secara wajar, jujur, dan tidak memihak dalam menyajikan informasi keuangan. Laporan keuangan yang idealnya netral dapat membantu pengambilan Keputusan.

3. Informasi Laporan Keuangan yang akurat, relevan dan tepat waktu

Merupakan karakteristik penting dari laporan keuangan berkualitas berdasarkan peraturan atau pedoman yang berlaku, menyajikan informasi secara menyeluruh serta menyajikan informasi secara jujur dan dapat diverifikasi.

Selain tersebut diatas, terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di internal maupun eksternal menjadi salah satu upaya yang telah dilakukan demi tercapainya target kinerja tahun 2024.

5. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator tersebut

Tindak lanjut kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA),

dilakukan dengan memantau dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada data transaksi keuangan dan BMN. Tindak lanjut ini dilakukan berdasarkan jenis permasalahan yang tercantum pada To Do List.

Tahapan tindak lanjut kualitas pelaporan keuangan antara lain:

- Memantau data transaksi keuangan dan BMN.
- Mengidentifikasi data yang tidak sesuai ketentuan.
- Menyelesaikan permasalahan berdasarkan jenis permasalahan yang tercantum pada To Do List.
- Mensegerakan penyelesaian To Do List sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024 capaian target Perjanjian Kinerja baru diberlakukan yaitu Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta akan terus meningkatkan kinerjanya ditahun mendatang sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.

6. Implementasi budaya nilai BerAKHLAK pada kegiatan ini



(Berorientasi Pelayanan/ Akuntabel/ Kompeten/ Harmonis/ Loyal/ Adaptif/ Kolaboratif) Dalam proses pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta telah mengimplementasikan budaya nilai berakhlak sebagaimana berikut ini:

A. Berorientasi pelayanan

- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan yang prima dengan mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.
- Untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif, setiap kegiatan diarahkan untuk memberikan

B. Akuntabilitas

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta menegakkan akuntabilitas melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pelaporan dilakukan secara berjenjang dan disertai bukti pendukung yang lengkap untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Kompetensi

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta terus mendorong pengembangan keahlian pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang relevan. Pegawai didorong untuk mengikuti pelatihan di bidang keuangan, administrasi, dan teknologi guna mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan pegawai mampu mengaplikasikan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.

D. Harmonis

Membangun komunikasi yang terbuka antarpegawai menjadi langkah utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Diskusi rutin, kegiatan kebersamaan, serta pendekatan kerja tim diterapkan untuk memperkuat solidaritas dan rasa kekeluargaan di lingkungan kerja. Dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan positif, diharapkan setiap individu mampu bekerja dengan lebih baik dan berkontribusi maksimal.

E. Loyal

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I JakartaBalai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta menanamkan nilai loyalitas dengan menekankan pentingnya komitmen terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Pegawai diarahkan untuk selalu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, sehingga keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kemajuan lembaga.

F. Adaptif

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, baik terkait kebijakan anggaran, perkembangan teknologi, maupun metode kerja terkini. Inovasi terus didorong agar proses pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program tetap relevan dan efektif di tengah tantangan yang berkembang.

G. Kolaboratif

Setiap kegiatan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dilaksanakan dengan semangat kerja sama yang kuat. Kolaborasi dilakukan tidak hanya di lingkungan internal tetapi juga dengan instansi terkait seperti KPPN, mitra kerja, dan pihak ketiga lainnya. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan dengan lancar, terintegrasi, dan sesuai target yang ditetapkan.

7. Efisiensi

Untuk mencapai Tingkat efisiensi dalam Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), dapat dilakukan dengan:

- Menguasai siklus akuntansi.
- Memastikan laporan keuangan akurat.
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- Memastikan transparansi, Memastikan laporan keuangan dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat.

Pada Tahun 2024 capaian Realisasi Anggaran Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta adalah 98,16% dengan capaian efisiensi anggaran adalah 1,84%. Bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta akan terus berupaya menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga akan selalu mendukung pencapaian kinerja yang optimal dalam melayani Masyarakat serta pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta.

8. Dampak

Keberhasilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta dalam mencapai target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Angaran (UAKPA) memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara operasional maupun strategis. Efektivitas dalam pemanfaatan anggaran tidak hanya memperkuat kinerja internal, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung stabilitas jaringan komunikasi, dan berkontribusi pada kemajuan sosial-ekonomi di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta.

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan yang berhasil dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta memberikan berbagai dampak positif terhadap wilayah kerja yang meliputi:

1. Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Frekuensi Radio

- Dengan pencapaian kinerja anggaran yang optimal, alokasi sumber daya untuk pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dapat terlaksana dengan baik.
- Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta, yang mencakup DKI Jakarta, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota/Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Kepulauan Seribu, dapat terlayani secara maksimal.
- Gangguan spektrum frekuensi yang berpotensi mengganggu layanan komunikasi publik dapat diminimalkan melalui peralatan yang lebih baik dan operasional yang optimal.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Dengan pemanfaatan anggaran yang efektif, layanan pengajuan izin frekuensi, pengawasan lapangan, dan penanganan gangguan frekuensi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan responsif.
- Hal ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan instansi yang mengandalkan stabilitas jaringan komunikasi untuk aktivitas sehari-hari.

3. Optimalisasi Penyerapan Anggaran untuk Kegiatan Strategis

- Anggaran yang digunakan secara efektif memastikan program kerja strategis, seperti pemantauan spektrum frekuensi, penertiban perangkat ilegal, dan sosialisasi penggunaan frekuensi dapat dilaksanakan secara tepat waktu.
- Dampaknya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dan stakeholder terhadap regulasi spektrum frekuensi, sehingga mengurangi potensi pelanggaran.

4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja

- Capaian kinerja anggaran yang optimal mendukung pengadaan peralatan pemantauan frekuensi modern yang lebih canggih, sehingga kualitas pengawasan meningkat.
- Sarana operasional seperti kendaraan, perangkat komunikasi, dan fasilitas kantor yang memadai berkontribusi pada kelancaran operasional di wilayah kerja yang luas dan beragam.

5. Penguatan Koordinasi dengan Stakeholder

- Pencapaian kinerja anggaran yang baik mencerminkan proses administrasi dan keuangan yang tertata dengan baik, sehingga mendukung kolaborasi yang lebih efektif dengan pihak eksternal.
- Koordinasi dengan instansi lain, seperti KPPN, operator telekomunikasi, dan pemerintah daerah, menjadi lebih lancar karena adanya kejelasan dalam perencanaan dan realisasi anggaran.

6. Percepatan Inovasi Layanan Digital

- Dengan anggaran yang teralokasi secara tepat, pengembangan sistem digital seperti pelayanan daring, pelaporan elektronik, dan pemantauan berbasis aplikasi dapat terlaksana dengan baik.
- Dampaknya adalah peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses oleh masyarakat.

7. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder

 Capaian kinerja yang optimal mencerminkan tata kelola anggaran yang baik dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat, instansi pemerintah lain, dan mitra kerja terhadap Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta sebagai institusi yang profesional dan kredibel.

9. Benchmark

Benchmark nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta merupakan proses membandingkan kinerja nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA suatu satuan kerja (Satker) dengan satuan kerja (Satker) yang sejenis. Benchmark nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA dapat dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Realisasi Belanja suatu satuan kerja (Satker).

Tujuan Benchmark nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA untuk mengetahui perbandingan kondisi nilai kualitas pelaporan keuangan suatu satker dengan satker yg lain, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan satker, menetapkan tujuan realistis, membuat Keputusan yg tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan serta memastikan keakuratan dan kehandalan informasi dalam laporan keuangan

Pada Benchmark target perjanjian kinerja (PK) untuk nilai kualitas pelaporan keuangan Tahun 2024 akan kita bandingkan dengan target perjanjian kinerja (PK) nilai kualitas pelaporan keuangan tahun 2023, hanya 2 periode karena nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA baru ada di perjanjian kinerja (PK) pada tahun 2023.

Benchmark Hasil nilai kualitas pelaporan keuangan antara Satker Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dengan Satker Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya terdapat penilaian yang berbeda dikarenakan pada tahun 2022 Kantor Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta terdapat kesalahan akun belanja sehingga mempengaruhi nilai kualitas pelaporan keuangan, pada point tersebut indicator penilaian laporan keuangan terdapat jumlah transaksi koreksi audit senilai -2,5 sehingga nilai akhir hanya mencapai 98 yang seharusnya 100. Berbeda dengan Satker Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya tidak terdapat nilai pengurang pada indicator penilaian laporan keuangan sehingga nilai akhir 100.

Benchmark antara Satker Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta dengan Satker Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya, sebagai berikut:

Hasil Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dan 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta

No	Indikator Penilalan Laporan Keuangan Satuan Kerja	Bobot	Faktor Penguran 8									Balmon Yogyakarta		Balmon Tangerang		Balmon Suraba	
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
	(1)	(2)	(3)	$(4) = (3) \times (3)$	2 (5)=(4) x 100		100		100		100		100		100		100
1	Jumlah transaksi koreksi audit	50%															
	1) Tidak ada transaksi koreksi audit		0%	0%	0		0		0		0		0		0	0	0
	2) Jumlah transaksi koreksi audit 1 s.d 5		-5%	-3%	-2,5	-2,5		-2,5		-2,5		-2,5		-2,5			
	3) Jumlah transaksi koreksi audit 6 s.d 10		-10%	-5%	-5												
	4) Jumlah transaksi koreksi audit 11 s.d 15		-15%	-8%	-7,5												
	5) Jumlah transaksi koreksi audit 16 s.d 20		-20%	-10%	-10												
	6) Jumlah transaksi koreksi audit lebih 20		-50%	-25%	-25												
2	Kesalahan penggunaan akun Belanja Modal/Barang	20%															
	Tidak ada kesalahan penggunaan akun		0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Kesalahan akun Rp 1 jt - Rp 100 jt		-5%	-1%	-1												
	3) Kesalahan akun Rp 100 jt - Rp 250 jt		-10%	-2%	-2												
	4) Kesalahan akun Rp 250 jt - Rp 500 jt		-15%	-3%	-3												
	5) Kesalahan akun Rp 500 jt - Rp 1Milyar		-20%	-4%	-4												
	6) Kesalahan akun di atas Rp 1Milyar		-50%	-10%	-10												
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhit tah	10%		_													
	1) Tidak terdapat saldo kas		0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Terdapat saldo kas		-100%	-10%	-10			_									
_	a) reruspec suruo kas		-200/6	-10/0	- 20												
٩	Ketepatan Waktu Penyampalan Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%															
	Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5%	-5												
5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuan	10%															
	1) Efektif	2076	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Efektif dengan pengecualian		-30%	-3%	-3	,	-	-	,	9	,	-	-	- 0	-	,	-
	3) Mengandung Kelemahan Matrial		-70%	-7%	-7												
_	5) Wenganoung Keremanan Maurai		-70%	-176	-/												
6	Ketepatan Waktu Penyampalan Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%															
	Sesuai/sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5%	-5												

Hasil nilai kualitas pelaporan keuangan pada tahun 2023 Kantor Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta tidak ada lagi kesalahan akun sehingga nilai kualitas pelaporan keuangan nilai akhir hanya mencapai 100.

Sedangkan untuk hasil nilai kualitas pelaporan keuangan pada tahun 2024 Kantor Balai Monitor SFR Kelas I Jakarta belum dinilai karena masih dalam proses penilaian.



PENUTUP

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sebagai bagian integral dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertanggung jawab atas manajemen sumber daya terbatas negara, termasuk spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta regulasi terkait sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di Indonesia. Kinerja Direktorat Jenderal ini memiliki dampak signifikan terhadap ketersediaan dan mutu layanan telekomunikasi, terutama dalam konteks perkembangan pesat telekomunikasi nirkabel. Ditjen Infradigimengenali sejumlah tantangan dalam manajemen sumber daya dan pengaturan sertifikasi, sejalan dengan dinamika teknologi yang cepat dan jumlah perangkat informatika yang terus peningkatan meningkat, yang menuntut kapasitas personel untuk meningkatkan kualitas layanan.

Sejalan dengan evolusi teknologi saat ini, penting untuk menyusun strategi sosialisasi yang modern dan inovatif namun tetap menjunjung prinsip efektivitas dan efisiensi. Peningkatan sosialisasi tentang penggunaan frekuensi radio kepada pengguna radio bertujuan untuk mendorong perilaku yang patuh dalam pemanfaatan frekuensi radio.

Meskipun ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugas lapangan, langkah-langkah perbaikan telah siap untuk diterapkan di masa depan, termasuk dalam hal infrastruktur, fasilitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta tahun 2024 ini disusun sebagai evaluasi kinerja dan sebagai panduan untuk perencanaan dan pelaksanaan tugas serta fungsi ke depan.

